

**ANALISIS FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA
KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI PROGRAM “AYO
WISATA KE BOJONEGORO”**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Governance dan
Transisi



Oleh :

NANDYA RISKHA PARAMITHA

NIM. 135120507111017

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

**ANALISIS FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO
MELALUI PROGRAM “AYO WISATA KE BOJONEGORO”**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**NANDYA RISKHA PARAMITHA
NIM. 135120507111017**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS
NIP. 195201011982031006

Pembimbing Pendamping



Faza Dhora Nailufar, S.IP., M.IP
NIK. 2012088601302001

**ANALISIS FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO
MELALUI PROGRAM “AYO WISATA KE BOJONEGORO”**

SKRIPSI

Disusun oleh:

NANDYA RISKHA PARAMITHA
NIM. 135120507111017

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 26 Febuari 2018

Tim Penguji

Ketua Sidang



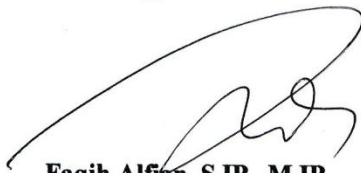
Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS
NIK. 195101011982031006

Sekretaris Sidang



Faza Dhora Nailufar, S.IP., M.IP
NIK. 2012088601302001

Anggota 1



Faqih Alfian, S.IP., M.IP
NIK. 2014058612161001

Anggota 2



Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc
NIK. 2016078805112001

Malang, 26 Febuari 2018
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Uti Ludigdo, Ak
NIP. 19690814 199402 1 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Nandya Riska Paramitha

NIM : 135120507111017

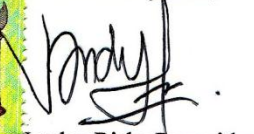
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI PROGRAM “AYO WISATA KE BOJONEGORO”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 16 Maret 2018

Pembuat Pernyataan,




Nandya Riska Paramitha
NIM. 135120507111017

ABSTRAK

Nandya Riska Paramitha, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Analisis Formula Kebijakan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Melalui Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Pembimbing : Dr. Hilmy Mochtar, MS dan Faza Dhora Nailufar., S.IP., M.IP

Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Penelitian ini merupakan penelitian formulasi kebijakan dengan pendekatan aktor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menganalisa mengenai peranan dan kepentingan aktor dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik dan *Teori Policy Network*.

Terdapat berbagai peranan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor baik itu dari legislatif, Disbudpar, sektor swasta, maupun masyarakat dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Legislatif memiliki peranan untuk mendorong adanya kebijakan serta berkepentingan agar kebijakan yang diambil mampu memberikan keuntungan secara politik. Disbudpar berperan sebagai regulator, inisiator, dan pengusul kebijakan, berkepentingan untuk menaikkan tingkat kunjungan wisatawan. Sektor swasta, yang berperan sebagai pengusul kebijakan dan pengelola industri pariwisata memiliki kepentingan untuk mendapatkan profit atas usaha mereka serta kemudahan berinvestasi. Kemudian masyarakat yang juga memiliki peranan dalam usulan kebijakan, juga memiliki kepentingan terkait perekonomian mereka serta kemudahan akses. Dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro para aktor kebijakan yaitu legislatif, Disbudpar, sektor swasta, serta masyarakat saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain supaya kepentingan mereka dapat terpenuhi melalui sumberdaya yang dimiliki oleh aktor lain.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Kebijakan Pariwisata, Peranan Aktor, Kepentingan Aktor

ABSTRACT

Nandya Riska Paramitha, Undergraduate Program, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University Malang. Analisis Formula Kebijakan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Melalui Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Supervisor : Dr. Hilmy Mochtar, MS and Faza Dhora Nailufar., S.IP., M.IP

This research is discuss about the formulation of tourism policy in Bojonegoro Regency through “Ayo Wisata ke Bojonegoro” programme. This research is talking about the tourism policy formulation using the actor approach. So, this research use the descriptive-qualitative method to analyze about the actor’s roles and the interests in the formulation of tourism policy in Bojonegoro Regency. This research use Public Policy theory and Policy Network Theory.

Each actors has lot of roles and interests through this tourism policy. At the formulation of tourism policy in Bojonegoro Regency, the policy actors which is legislative, Disbudpar, private sector, and also the society. The legislative has a role to push the policy and they interested to get the political advantages from that policy. Disbudpar who has a role as a regulator, inisiator, and the policy proposer is interested to upgrading the tourist visiting amount. The private sector who has a role as policy proposer and do the business at tourism industry, are interested to go get more profit for their business and get the easier way to investing. The last, the society who has a role as policy proposer also have their interests through this policy to increasing their economic level. Those actors are interacted to each other and they need the other actor and their power to get their own goal because of the limitness of their own power to get their goal.

Keywords : Policy formulation, Tourism policy, Actor’s role, Actor’s interest

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta kemudahan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI PROGRAM “AYO WISATA KE BOJONEGORO”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis atas semangat, motivasi, bantuan dan kontribusi yang telah didapatkan oleh penulis dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Siradjul Muslim dan Ibu Dra. Idayani selaku orang tua dari penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta dukungannya baik secara moril maupun materiil.
2. Bapak Prof. Unti Ludigdo, Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Sholih Mu’adi, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Dr. Hilmy Mochtar, MS selaku dosen pembimbing utama serta Ibu Faza Dhora Nailufar, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia untuk menuntun, mengarahkan, memberikan masukan, serta membimbing penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Faqih Alfian, S.IP.,M.IP dan Ibu Resya Famelasari S.Sos., M.Soc.Sc yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani studi di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
7. Bapak Sigit Kushariyanto, S.E.,MM, Ibu Dyah Enggarini Mukti, S.E.,MM, Bapak Supriyo, Bapak Rudianto, serta Bapak Sarji yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan informasinya kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian skripsi ini.
8. Andre Diaz Kusuma Dewa, adik penulis yang telah menemani dan mengantarkan penulis ke beberapa lokasi penelitian selama melaksanakan penelitian di lapangan.
9. Pratama Rizky yang telah memberikan support kepada penulis, masukan, saran, serta menemani penulis melaksanakan penelitian di lapangan hingga penulis melaksanakan sidang skripsi.

10. Teman-teman kost Lt.1 Griya DW Squad, Whindy, Tika, Titan, Lian, Stephanie, Nita dan Vira yang telah memberikan semangat dan keceriaan.
11. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2013, FISIP Universitas Brawijaya, Mas Budi dan Mas Lutfi yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus skripsi, serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Sebagai penulis skripsi ini, saya menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

Malang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Akademis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori	14
2.1.1 Kebijakan Publik	14
2.1.1.1 Politik dalam Kebijakan Publik.....	20
2.1.2 <i>Policy Network</i>	27

2.2 Kerangka Konseptual	28
2.2.1 Aktor dalam Kebijakan Publik	28
2.2.2 Pariwisata.....	35
2.3 Penelitian Terdahulu	41
2.4 Kerangka Pemikiran.....	46

BAB III

METODE PENELITIAN	49
3.1 Metode Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Fokus Penelitian	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5 Pemilihan Informan.....	56
3.6 Instrumen Penelitian.....	59
3.7 Sumber Data	61
3.8 Teknik Analisis Data.....	63
3.9 Uji Keabsahan Data.....	66

BAB IV

PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO	68
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	68
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro	70
4.3 Geografi dan Topografi Kabupaten Bojonegoro.....	73
4.4 Ekonomi dan Budaya Kabupaten Bojonegoro	75
4.4.2 Kondisi Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.....	75
4.4.3 Budaya Kabupaten Bojonegoro	76
4.5 Potensi Wisata Kabupaten Bojonegoro.....	79
4.5.1 Objek Wisata Kabupaten Bojonegoro	79
4.5.2 Aksesibilitas.....	92
4.5.3 Amenitas	93

4.5.4 Potensi Market Wisatawan	94
4.6 Aktor dalam Sektor Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.....	96
4.6.1 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	96
4.6.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro	98
4.6.3 Sektor Swasta	100
4.6.4 Masyarakat.....	100

BAB V

PERANAN DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO	102
5.1 Peranan Aktor dalam Pembuatan Kebijakan.....	102
5.1.1 Peranan Legislatif	102
5.1.2 Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro .	105
5.1.3 Peranan Sektor Swasta.....	110
5.1.4 Peranan Masyarakat.....	112
5.2 Kepentingan Aktor dalam Pembuatan Kebijakan	115
5.2.1 Kepentingan Legislatif	115
5.2.2 Kepentingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	118
5.2.3 Kepentingan Sektor Swasta	121
5.2.4 Kepentingan Masyarakat	123
5.3 Analisis <i>Policy Network</i>	125
5.4 Dampak Sektor Pariwisata bagi Kabupaten Bojonegoro	130
5.5 Hambatan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.....	137

BAB VI

PENUTUP.....	141
6.1 Kesimpulan.....	141
6.2 Rekomendasi	143

DAFTAR PUSTAKA	144
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	150
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Tahap-tahap Pembuatan Kebijakan Publik.....	17
Gambar 2.2 : Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Publik.....	22
Gambar 2.3 : Bentuk-bentuk Pariwisata.....	39
Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bojonegoro.....	74
Gambar 4.2 : Kayangan Api.....	79
Gambar 4.3 : Dander Waterpark.....	80
Gambar 4.4 : Waduk Pacal.....	81
Gambar 4.5 : Atas Angin.....	82
Gambar 4.6 : Teksas Wonocolo.....	82
Gambar 4.7 : Kedung Maor.....	83
Gambar 4.8 : Wisata Krondonan.....	84
Gambar 4.9 : Watu Gandul.....	85
Gambar 4.10 : Agrowisata Belimbing Ngringinrejo.....	86
Gambar 4.11 : Petilasan Angling Darma.....	87
Gambar 4.12 : GoFun Entertainment Complex.....	88
Gambar 4.13 : Gerabah Malo.....	89
Gambar 4.14 : Alun-alun Bojonegoro.....	90
Gambar 4.15 : Agroguna Bojonegoro.....	91
Gambar 4.16 : Akses Jalan Menuju Kayangan Api.....	92

Gambar 4.17 : Promosi Wisata Oleh Eksekutif.....	97
Gambar 5.1 : Pedagang di Objek Wisata Dander Waterpark.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4.1 : Tingkat Kunjungan Wisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang cukup berkembang beberapa tahun belakangan ini. Meskipun pada tahun 2016 Kabupaten Bojonegoro masih menempati posisi ke-8 sebagai daerah termiskin di provinsi Jawa Timur¹, namun usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai sektor tidak dapat diacuhkan begitu saja. Berbagai pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Kualitas hidup masyarakat yang tinggal di suatu daerah, sangat berpengaruh pada produktifitas daerah tersebut. Dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sedang gencar untuk meningkatkan produktifitas masyarakat Bojonegoro dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bojonegoro. Salah satu usaha pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya adalah dengan cara mengoptimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Pariwisata sebetulnya merupakan sebuah sektor yang sangat bermanfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, sektor pariwisata akan mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang cukup besar jika pemerintah dapat mengelola objek wisata

¹ Vera Astanti (2016), *Bojonegoro Menduduki Peringkat 8 Termiskin Se Jawa Timur*, diakses dari <https://beritabojonegoro.com/read/9028-bojonegoro-menduduki-peringkat-8-termiskin-se-jawa-timur.html> diakses tanggal 10 Maret 2017

tersebut dengan baik. Kemudian bagi masyarakat, adanya sebuah objek wisata akan mampu memberikan sedikit ketenangan maupun hiburan ditengah-tengah rutinitas sehari-hari.

Menurut Zendrato, dalam Kebudayaan dan Pariwisata Nias, Pariwisata didefinisikan sebagai berikut :

“Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait masalah sosial, politik, ekonomi, keagamaan, ketertiban, keramahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk institusi sosial yang mengaturnya”².

Berdasarkan pada definisi pariwisata yang dikemukakan oleh Zendrato, maka dapat kita ketahui bahwasannya pariwisata berkaitan dengan berbagai aspek yang terlibat didalamnya termasuk pada politik sebagai *“the mother of science”*. Aspek politik dalam sektor pariwisata memiliki peranan yang cukup krusial mengingat sebuah kebijakan pariwisata yang dirumuskan oleh pemerintah terkadang mengandung berbagai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis dan melibatkan berbagai kepentingan didalamnya.

Hingga pada tahun 2013, Kabupaten Bojonegoro masih memiliki sedikit sekali objek wisata. Objek wisata tersebut diantaranya Dander Waterpark, Kayangan Api, dan Waduk Pacal. Objek-objek wisata yang sudah sedikit jumlahnya tersebut, semakin diperparah dengan tidak adanya fasilitas yang cukup baik di objek-objek wisata tersebut. Terlebih lagi, infrastruktur jalan menuju beberapa objek wisata dirasa tidak begitu baik. Hal ini kemudian berimplikasi

² Zendrato, Samudra Kurniawan (2014), *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, Hlm. 62

pada minat masyarakat Bojonegoro untuk berwisata di daerahnya sendiri. Sehingga, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bojonegoro memilih untuk pergi ke luar Kabupaten Bojonegoro untuk berwisata. Tujuan utama masyarakat Bojonegoro untuk berwisata adalah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan yang telah terlebih dahulu menunjukkan keseriusan dalam mengelola potensi di sektor pariwisatanya. Alasan geografis yang saling berdekatan, membuat masyarakat Bojonegoro lebih memilih untuk pergi berwisata ke kedua kabupaten tetangga ini. Selain itu, banyaknya objek wisata yang telah digarap dengan baik seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pantai Boom, Goa Akbar, dan lain-lain, mendorong banyaknya masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk berwisata ke Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Lamongan.

Sebetulnya Kabupaten Bojonegoro juga memiliki banyak sekali tempat-tempat menarik dengan pemandangan yang cukup indah untuk dijadikan sebagai objek wisata. Namun, kurangnya perhatian dari masyarakat setempat maupun pemerintah lokal membuat lokasi-lokasi potensial tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah objek wisata. Terlebih lagi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebelumnya juga kurang memberikan perhatian pada sektor pariwisata meskipun sebenarnya Kabupaten Bojonegoro memiliki banyak sekali potensi wisata. Hingga tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih saja terfokus pada 3 objek wisata utama di Kabupaten Bojonegoro, yakni Kayangan Api, Dander Waterpark, serta Waduk Pacal yang memang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro. Namun ketiga

objek wisata ini juga dapat dikatakan sepi pengunjung dan kurang menarik mengingat infrastruktur di ketiga objek wisata tersebut juga masih tergolong minim.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang akan mendatangkan banyak sekali keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena sektor pariwisata pastilah akan menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang kemudian akan menghasilkan relasi dengan kesejahteraan masyarakat. Wisatawan yang sedang berwisata, pastilah akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi akomodasinya selama melakukan perjalanan wisata, baik biaya untuk tempat penginapan, biaya transportasi, membeli cinderamata, dan keperluan-keperluan lain. Hal-hal tersebut pastilah berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat di daerah wisata tersebut.

Menurut Leiper, dalam Pitana, setidaknya terdapat beberapa dampak ekonomi pariwisata, antara lain³ :

a. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata seperti hotel, restoran, penyedia jasa transportasi, agen perjalanan, pemandu wisata, penjual souvenir, maupun pengelola objek wisata.

³ I Gde Pitana (2009), *et.al*, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI, Hlm. 186-188

b. Pendapatan pemerintah

Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sektor pariwisata pada umumnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wisatawan yang biasanya dikenakan pada pajak hotel dan restoran.

c. Penyerapan tenaga kerja

Sektor pariwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari sektor lain. Banyaknya sektor yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata itu sendiri, membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang kemudian menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja sehingga banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata, misalnya karyawan hotel, karyawan restoran, maupun usaha-usaha mikro di bidang pariwisata.

d. *Multiplier effects*

Terdapat beragam efek *multiplier* yang dapat dihitung dari kegiatan pariwisata, yaitu *expenditure*, *employment*, *income*, dan sebagainya.

Pada era kepemimpinan Bupati Suyoto, terlebih lagi pada periode jabatannya yang kedua, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memberikan perhatian sedikit demi sedikit pada sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa objek wisata baru yang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Objek-objek wisata baru tersebut antara lain Wisata

Atas Angin di Kecamatan Sekar, Kedung Maor di Kecamatan Temayang, Agrowisata Salak di Kecamatan Wedi, Agrowisata Blimbing Ngringinrejo dan Wisata Bendungan Gerak di Kecamatan Kalitidu serta yang terbaru pada tahun 2016 adalah pembangunan sebuah *theme park* pertama di Kabupaten Bojonegoro yang bernama GoFun yang dikelola oleh pihak swasta namun telah mampu menjadi ikon pariwisata baru di Kabupaten Bojonegoro. Selain membuka objek wisata baru, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga turut melakukan perbaikan maupun revitalisasi objek-objek wisata yang sudah ada.

Pada saat ini, kabupaten Bojonegoro sedang dipimpin oleh Suyoto seorang Bupati yang sangat inovatif di berbagai bidang. Banyak sekali perubahan kearah yang lebih positif yang telah beliau berikan untuk Kabupaten Bojonegoro. Berbagai bidang di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan banyak sekali perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan serta perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sangat terasa sangat nyata dan memberikan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro seperti dengan adanya revitalisasi dan perbaikan Taman Wisata Dander Waterpark, serta pembangunan infrastruktur jalan menuju objek-objek wisata baru. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro setidaknya memiliki beberapa program untuk mengembangkan potensi wisata dan kebudayaan di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan pada situs resmi pariwisata Kabupaten Bojonegoro, kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2016 mencapai 415.675 wisatawan yang didasarkan pada tiket masuk, data pengunjung, maupun karcis parkir pada 13 objek wisata. Kunjungan wisatawan tertinggi diperoleh objek wisata Agrowisata Belimbing Ngringinrejo yang terletak di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu dengan total kunjungan sebanyak 109.961 wisatawan. Kemudian, objek wisata yang memperoleh kunjungan wisatawan terbanyak adalah Negeri Atas Angin yang terletak di Kecamatan Sekar, yaitu sebanyak 102.724 wisatawan terhitung mulai bulan April hingga bulan Oktober tahun 2016⁴. Total wisatawan di Kabupaten Bojonegoro sendiri pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bojonegoro hanya mencapai 56.631 kunjungan di tiga objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan menjadi 659.619 kunjungan di 15 objek wisata⁵.

Naiknya jumlah kunjungan wisatawan yang sangat drastis pada tahun 2016 tersebut, pastilah membawa dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada tahun 2016, sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro berhasil

⁴ Anonymous (2016) *Data Kunjungan Wisatawan ke Bojonegoro 2016*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/data-kunjungan-wisatawan-ke-bojonegoro-2016/> tanggal 22 November 2017

⁵ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Data Kunjungan Wisata Tahun 2016* data diambil tanggal 16 Januari 2018

menyumbangkan PAD sebesar 1.301.487.500 rupiah dari tiga objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro⁶.

Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ini dimulai pada akhir tahun 2015 dan masih terus berlanjut hingga tahun 2017 ini. Program tersebut secara umum mempromosikan objek-objek wisata yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, program ini juga turut mempromosikan berbagai kegiatan atau festival kebudayaan yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara pemasangan *banner* berukuran sangat besar di lokasi-lokasi yang dinilai strategis seperti di pasar serta alun-alun Kota Bojonegoro. Cara lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mempromosikan potensi wisatanya adalah dengan cara memasang foto-foto objek wisata di Kabupaten Bojonegoro di *website* resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Peranan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro juga harus diperhitungkan keberadaannya mengingat sektor ini adalah sektor yang mengelola lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bojonegoro secara langsung. Sektor swasta yang terlibat dalam industri pariwisata di Kabupaten Bojonegoro adalah pengelola hotel, investor, penyedia infrastruktur wisata, penyedia jasa wisata (*tour and travel*), bahkan pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata.

⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016*, Hlm. 51 data diambil pada tanggal 16 Januari 2018

Adanya program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini sendiri pastilah memberikan beberapa perubahan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terlebih lagi kuota anggaran untuk sektor pariwisata. Selain kebijakan mengenai anggaran, adanya program tersebut juga telah mendorong kebijakan baru pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingat sejak dilaksanakannya program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”, beberapa hotel baru telah berdiri di Kabupaten Bojonegoro untuk melancarkan aktivitas wisata. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah pastilah memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Kebijakan yang terkait dengan sektor pariwisata, dapat dikatakan sebagai kebijakan publik mengingat kebijakan di sektor ini akan mempengaruhi hajat hidup banyak orang ataupun pihak.

Menurut James Anderson dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making* yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik didefinisikan sebagai berikut : “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”⁷. Berdasarkan pada definisi ini, kita sudah dapat melihat bahwa permasalahan yang diperhatikan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya sektor pariwisata adalah banyaknya potensi wisata yang kurang diperhatikan. Kebijakan ataupun program yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan sektor pariwisata, akan menimbulkan berbagai dampak bagi sektor pariwisata itu sendiri.

⁷ Leo Agustino (2014), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 7

Sebuah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, pastilah telah melalui berbagai tahapan formulasi kebijakan dimana banyak sekali kepentingan aktor-aktor politik maupun kepentingan lembaga didalamnya. Keterlibatan aktor didalam sebuah perumusan kebijakan publik merupakan hal yang sangat menarik mengingat masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Adanya keterlibatan aktor dibalik setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas di dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan Pariwisata Melalui Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dengan menggunakan pendekatan peranan aktor yang terlibat dalam penyusunan kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini akan menggunakan teori Kebijakan Publik dan teori *Policy Network*. Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yang masih tergolong baru ini, setidaknya sudah dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat tahapan formulasi kebijakan pariwisata Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui pendekatan aktor kebijakan.

Mengingat besarnya PAD yang disumbangkan oleh sektor Pariwisata pada tahun 2016, perumusan kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat menarik. Karena, dengan sumbangan PAD senilai 1,3 Milyar Rupiah tersebut dapat dilihat bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro mulai menjanjikan bagi beberapa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan

Pariwisata Melalui Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ini beserta peranan dan kepentingan yang dimiliki aktor yang ada di dibalik kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?
2. Apa kepentingan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”

2. Mengetahui kepentingan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan tambahan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola sektor pariwisatanya. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peranan dan kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dibalik kebijakan tersebut. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dalam ranah ilmu politik, khususnya kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kebijakan di wilayah Kabupaten Bojonegoro supaya kebijakan yang telah dibuat, khususnya kebijakan di sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro serta memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan banyak sekali implikasi bagi politik dan pemerintahan di daerah. Akibat diberlakukannya undang-undang ini, maka Indonesia juga turut menerapkan Otonomi Daerah atau yang biasa kita sebut dengan Otda. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku⁸. Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia baik itu Kotamadya maupun Kabupaten telah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pada urusan rumah tangga daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap daerah di Indonesia memiliki potensi serta kekurangan yang berbeda satu sama lain. Jika hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan, maka potensi yang dimiliki oleh daerah tidak akan dapat digunakan secara maksimal.

⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia telah memberikan banyak sekali dampak positif bagi pemerintahan daerah. Berkat diberlakukannya Otonomi Daerah, pemerintah daerah harus cakap untuk mengelola dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu untuk membuat kebijakan maupun peraturan daerah untuk dapat mengatur urusan pemerintahan serta urusan rumah tangganya.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, berbagai kewenangan dan pembiayaan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara lebih riil dan efisien. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang sesuai dengan masyarakat setempat⁹.

Menurut Carl Friedrich, dalam Leo Agustino kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud¹⁰. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang telah diusulkan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan-kesulitan tertentu serta untuk memanfaatkan kesempatan atau kemungkinan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah selaku unit organisasi pastilah memiliki berbagai tujuan yang

⁹ Leo Agustino (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 7

ingin dicapai untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah tersebut maupun untuk memenuhi tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian, James Anderson juga memberikan definisi mengenai kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making* sebagaimana yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan¹¹. Berdasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh Anderson ini maka dijabarkan bahwa kebijakan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dan tujuan dari kegiatan tersebut berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Anderson dalam mendefinisikan kebijakan publik juga menekankan ada keberadaan aktor atau sekelompok aktor yang mendorong terciptanya suatu kebijakan publik. Aktor dalam kebijakan publik di daerah pada umumnya merupakan elit politik kelompok kepentingan, maupun kelompok penekan.

Secara garis besar, dalam proses pembuatan suatu kebijakan publik setidaknya terdapat 5 tahapan atau proses yang harus dilewati untuk membuat suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh William N. Dunn, tahapan-tahapan tersebut secara garis besar terdiri dari : 1) Tahap Perumusan Agenda, 2)

¹¹ *Ibid*,

Tahap Formulasi Kebijakan, 3) Tahap Adopsi Kebijakan, 4) Tahap Implementasi Kebijakan, dan 5) Tahap Evaluasi Kebijakan¹².

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber : Willliam N. Dunn, 1999

Berdasarkan pada gambar diatas, maka proses atau tahapan-tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan publik daat dijelaskan melalui uraian berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Tahapan pertama dalam penyusunan sebuah kebijakan publik merupakan perumusan masalah atau penyusunan agenda. Perumusan masalah atau penyusunan agenda dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi

¹² William N. Dunn (1999), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm. 24-25

masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda atau *agenda setting*. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang kebijakan yang baru¹³.

Pada tahapan ini, permasalahan yang dijadikan sebagai agenda kebijakan sangatlah erat kaitannya dengan perhatian pemerintah maupun orang-orang di luar pemerintah yang terkait dengan pejabat pemerintahan mengenai suatu isu atau kepentingan tertentu. Menurut Muchlis Hamdi, dengan makna agenda tersebut, penentuan agenda merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kraft dan Furlong, dalam Muchlis Hadi mendefinisikan penentuan agenda sebagai *how problems are perceived and defined, command attention, and get onto the political agenda* (bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik)¹⁴.

2. Formulasi Kebijakan

Tahapan kedua dari proses penyusunan sebuah kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, pada tahapan ini, pejabat eksekutif maupun legislatif selaku pembuat kebijakan merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Formulasi kebijakan merujuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam

¹³ *Ibid*, Hlm. 26

¹⁴ Muchlis Hamdi (2014) *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm. 80

pemerintahan¹⁵. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat pemerintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif¹⁶.

Kraft dan Furlong, dalam Muchlis Hamdi menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai “desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut”¹⁷.

3. Adopsi Kebijakan

Tahap ketiga dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah tahap adopsi kebijakan. Pada tahapan ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan¹⁸.

4. Implementasi Kebijakan

Tahapan keempat dalam pembuatan sebuah kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Setelah sebuah kebijakan selesai dirumuskan dan diadopsi maka sebuah kebijakan publik siap untuk diimplementasikan pada masyarakat untuk mengatasi persoalan yang telah diagendakan. Menurut Leo Agustino, proses implementasi kebijakan setidaknya menyangkut tiga hal, antara lain¹⁹ :

- a.) adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- b.) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian;
- c.) adanya hasil kegiatan.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ William N. Dunn, *Op.Cit.*, Hlm. 24

¹⁷ Muchlis Hamdi, *Loc.Cit*

¹⁸ William N. Dunn, *Ibid*,

¹⁹ Leo Agustino, *Op.Cit*, Hlm. 139

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri²⁰.

5. Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Tahapan terakhir dalam proses pembuatan sebuah kebijakan adalah evaluasi atau penilaian kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Pada tahapan ini, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat.

Evaluasi kebijakan juga turut menilai pengaruh dari kebijakan itu sendiri

Menurut Lester dan Stewart dalam Leo Agustino, evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan²¹.

2.1.1.1 Politik dalam Kebijakan Publik

Aspek politik merupakan sebuah aspek yang sangat luas cakupannya dan terdapat di berbagai macam bidang, termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik sering kali hanya dikaitkan dengan persoalan administratif, meskipun sebenarnya sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari aspek politik. Terbentuknya sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari beberapa proses yang sangat

²⁰ Leo Agustino, *Op.Cit* Hlm. 139

²¹ *Ibid*, Hlm. 185

kental akan persoalan-persoalan politik maupun berbagai kepentingan. Hal-hal yang sarat akan muatan politis tersebut, bahkan dapat dijumpai dari awal proses perumusan sebuah kebijakan publik, yaitu pada tahap perumusan masalah atau penyusunan agenda kebijakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemegang kekuasaan dalam mengambil sebuah keputusan politik, termasuk dalam merumuskan sebuah kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi-kondisi ekonomi, persyaratan-persyaratan prosedural, komitmen-komitmen yang telah dibuat sebelumnya, tekanan-tekanan sosial dan politik, dan sebagainya. Jika terdapat tekanan-tekanan sosial-politik dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam kebijakan publik, biasanya keputusan dibuat berdasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Para ilmuwan politik sering menggunakan perspektif ini dalam mempelajari dan menilai pembentukan kebijakan²².

Perumusan kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan penggambaran sebab-sebab dan proses terbentuknya kebijakan publik dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Proses perumusan kebijakan publik secara kritis mempertanyakan mengapa dan bagaimana proses kebijakan tertentu yang diputuskan. Setelah kebijakan selesai dirumuskan, maka akan terdapat pertanyaan mengenai siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan akibat adanya kebijakan tersebut,

²² Budi Winarno (2012), *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS Hlm. 136-137

juga perlu untuk dianalisis secara mendalam. Sebuah kebijakan publik selalu saja terkandung distribusi dan alokasi sumber-sumber daya, sehingga proses pelaksanaan kebijakan publik juga sarat dengan perjuangan siapa, bagaimana, dan kapan bias memperebutkan sumber daya yang menyertainya. Hal yang terpenting dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik adalah formulasi kebijakan²³. Pada tahapan formulasi kebijakan ini, banyak sekali terdapat faktor-faktor politis yang terlibat didalamnya.

Menurut Palumbo, dalam Budi Prasetyo, setidaknya terdapat empat tahapan dalam perumusan kebijakan publik dimana pada masing-masing tahapan terdapat banyak unsur-unsur politis dan berbagai kepentingan di dalamnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah agenda setting, penentuan masalah (*problem definition*), usulan kebijakan (*policy design*) dan yang terakhir adalah legitimasi kebijakan (*policy legitimation*)²⁴.

Gambar 2.2 : Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Publik



Sumber : Budi Prasetyo, 2009

²³ Budi Prasetyo (2009), *Politik Kebijakan : Proses Politik dalam Arena Kebijakan*, Surabaya : Lutfansah Mediatama dan Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Hlm. 50

²⁴ *Ibid*, Hlm. 51-62

1. *Agenda Setting*

Tahapan pertama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah *agenda setting* yang merupakan tahapan untuk menganalisis dan menetapkan sifat dan besaran serta distribusi masalah yang dipecahkan dalam kebijakan yang dirumuskan. Menemukan dan merumuskan masalah yang tepat merupakan bagian yang sangat penting dalam perumusan kebijakan publik. Ada kalanya kebijakan menjadi bias kepentingan individu atau kelompok juga disebabkan proses penentuan dan pendefinisian masalah sarat dengan perjuangan kepentingan kelompok tertentu untuk mementingkan penyelesaian atas masalahnya dengan mengesampingkan masalah lain yang dianggap tidak penting. Sebuah masalah merupakan masalah publik atau privat sangat tergantung dari *political will* rezim yang sedang berkuasa. *Political will* ini mampu untuk menggiring perhatian dan skala prioritas terhadap upaya-upaya pendefinisian dan pemecahan masalah yang termasuk dalam ranah publik²⁵.

2. Penentuan Masalah (*Problem Definition*)

Tahapan kedua dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penentuan masalah atau *problem definition* dimana tahapan ini meliputi kegiatan memperkirakan kebutuhan menetapkan area atau wilayah permasalahan dan menentukan kelompok sasaran dalam kebijakan publik yang dirumuskan, tidak semua usulan masalah dari masyarakat

²⁵ *Ibid*, Hlm. 51-53

mendapatkan perhatian untuk diteruskan dalam proses perumusan kebijakan. Terdapat proses seleksi dan proses penekanan-penekanan tertentu yang dapat tertangkap dalam skala prioritas perhatian pembuat kebijakan. Permasalahan yang diperjuangkan dan dapat menjadi perhatian inilah yang selanjutnya akan diarahkan untuk menjadi agenda kebijakan yang ditetapkan bersama²⁶.

Agenda kebijakan bahkan juga dapat dibedakan dari “prioritas politik”, dimana biasanya memberikan urutan peringkat pada agenda dengan pertimbangan lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dibandingkan dengan lainnya. Dalam sistem politik, akan terdapat sejumlah agenda kegiatan, dimana Cobb dan Elder, dalam Agustino memberikan pendapat bahwa terdapat dua tipe dasar agenda, yaitu agenda sistematis (*the sistematic agenda*) dan agenda institusional (*the institutional agenda*) atau juga bisa disebut dengan agenda pemerintahan (*governmental agenda*)²⁷.

- Agenda Sistematis (*The Sistematic Agenda*)

Agenda sistematis berisi mengenai semua persoalan yang dipandang secara umum oleh anggota kelompok politik sebagai suatu hal yang patut memperoleh perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan yang sah dari setiap tingkat pemerintahan yang ada²⁸.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 55

²⁷ Leo Agustino., *Op.Cit*, Hlm. 105

²⁸ *Ibid*,

- Agenda Institusional (*The Institutional Agenda*)

Agenda institusional atau agenda pemerintahan terdiri dari persoalan-persoalan yang termaktub dalam agenda sistematik dimana kemudian pejabat publik memberikan perhatian yang serius dan aktif atas isu-isu yang berkembang dalam agenda sistematik. Agenda institusional merupakan agenda pelaksanaan yang sifatnya lebih spesifik dan konkret pada agenda sistematik²⁹.

3. Usulan Kebijakan (*Policy Design*)

Tahapan ketiga dalam proses perumusan kebijakan publik adalah usulan kebijakan atau *policy design* yang bertujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep, yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam penyusunan *policy design*. Komponen-komponen tersebut antara lain³⁰ :

- Siapa yang terlibat ?

Keterlibatan berbagai pihak dalam perumusan kebijakan publik merupakan sebuah instrumen dalam rumusan kebijakan publik tersebut. Data yang digunakan untuk menyusun *policy design* dapat dikumpulkan pada banyak instrumen yang berupa institusi maupun

²⁹ *Ibid*, Hlm.106

³⁰ Budi Prasetyo., *Loc.Cit*, Hlm. 59-60

personal pada saat kegiatan formulasi kebijakan didefinisikan dan dirumuskan.

- Perumusan Kebijakan Sebagai Suatu Proses

Maksud komponen ini adalah dalam penyusunan *policy design*, perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang kemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik, apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dalam perumusan masalah ini harus diperhitungkan dengan seksama persoalan-persoalan baik politis, teknis maupun pertimbangan akademis sehingga dapat diperoleh hasil kebijakan yang memang secara komprehensif mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Perhitungan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memecahkan masalah yang diagendakan tetapi juga harus memperhitungkan dampak-dampak yang dapat muncul berkaitan dengan kebijakan yang dirumuskan tersebut.

4. Legitimasi Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Tahapan terakhir dalam proses perumusan kebijakan publik adalah tahapan legitimasi kebijakan atau *policy legitimation* yang menganalisis penerimaan *stakeholder* terhadap kebijakan yang dirumuskan. Perumusan kebijakan, dalam prakteknya sering kali tercampur dengan tahap keputusan kebijakan dalam proses kebijakan. Sejatinya perumusan

kebijakan berhubungan dengan didapatkannya persetujuan dari alternatif kebijakan yang dipilih, sedangkan keputusan kebijakan adalah mekanisme dalam memutuskan atau menyetujui alternatif kebijakan terbaik yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung dalam formulasi kebijakan³¹.

2.1.2 Policy Network

Interaksi aktor dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dari interaksi yang dilakukan oleh para aktor tersebut sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan baru. Kickert dkk, dalam *Managing Complex Networks : Strategies for Public Sectors* menegaskan bahwa dalam *public policy making* dan *governance* perlu dibangun kerangka jaringan (*network*) antar berbagai aktor meliputi individu, koalisi, biro, ataupun organisasi. Kerangka jaringan ini kemudian dikenal sebagai *Policy Network*³².

Policy network ini, dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola hubungan saling ketergantungan diantara para aktor yang terlibat didalam suatu formulasi kebijakan publik. Ketergantungan yang terjadi diantara para aktor yang terlibat didalam formulasi suatu kebijakan disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari masing-masing aktor untuk mencapai atau memenuhi tujuan atau kepentingannya. Sehingga, aktor tersebut memerlukan aktor lain yang

³¹ Budi Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 62

³² Kickert, *et.al* (1999), *Managing Complex Networks : Strategies for Public Sectors*, London : SAGE Publications

yang memiliki sumberdaya yang dapat membantu untuk memenuhi tujuan dan kepentingannya. Sehingga dari hal tersebut akan menghasilkan interaksi aktor dalam formulasi kebijakan untuk saling membantu supaya tujuan atau kepentingan dari masing-masing aktor dapat tercapai atau terpenuhi.

Menurut Pierre dan Peters, dalam Pratikno, adanya interaksi yang terjadi diantara aktor kebijakan ini pastilah menimbulkan suatu konsekuensi. Dengan adanya interaksi aktor dalam perumusan kebijakan publik ini, maka kebijakan publik menjadi lebih ditentukan oleh keinginan aktor yang terkait melalui proses negosiasi. Relasi pemerintah dengan aktor yang lain pun menjadi lebih setara dan pemerintah tidak dapat lagi dengan mudah memaksakan kepentingannya³³.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Aktor dalam Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik, dirumuskan oleh aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik. Aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah perumusan kebijakan publik pastilah saling berkaitan dengan aktor-aktor politik. Di Indonesia, kalangan eksekutif dan kalangan legislatif yang memiliki wewenang formal dalam sebuah perumusan kebijakan pada umumnya merupakan kader-kader dari partai politik yang memiliki banyak kepentingan. Sehingga, dalam merumuskan sebuah kebijakan publik yang baru,

³³ Pratikno (2007), Governance dan Krisis Teori Organisasi, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 11 Nomor 2, Hlm. 135

kedua kalangan ini akan turut mempertimbangkan kepentingan individual ataupun kelompok mereka.

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Pada era demokrasi seperti pada saat ini, masyarakat sebagai individu maupun organisasi-organisasi swasta telah memiliki akses untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik. Namun, dalam pembuatan keputusan kebijakan, wewenang formal tetap berada pada pejabat-pejabat pemerintahan, yaitu kalangan agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keempat kelompok ini disebut juga dengan aktor atau pemeran serta resmi. Oleh karena itu, masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, ataupun warga Negara individu tersebut sering kali disebut sebagai aktor atau pemeran serta tidak resmi dalam sebuah perumusan kebijakan publik³⁴.

a. Aktor Resmi

- **Eksekutif**

Eksekutif memiliki peranan yang penting dalam perumusan kebijakan dimana eksekutif berhak dan berwenang untuk membentuk kelompok kelompok penasihat yang ditujukan untuk menyelidiki suatu kebijakan tertentu dan mengembangkan usul-usul kebijakan. Hal ini disebabkan karena konstitusi Indonesia yang memberikan wewenang yang besar

³⁴ Budi Winarno, *Loc.Cit* Hlm. 126

kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, termasuk untuk merumuskan sebuah kebijakan publik³⁵.

- Legislatif

Lembaga legislatif memiliki peranan yang besar dalam pembentukan suatu kebijakan publik. Badan legislatif memiliki kekuasaan dan memiliki peranan yang cukup krusial didalam setiap perumusan kebijakan. Setiap undang-undang ataupun kebijakan yang menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif berdasarkan usulan yang dikemukakan oleh eksekutif. Selain itu, ketelibatan lembaga legislatif dalam prumusan kebijakan juga dapat dilihat dari mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan dan kontak-kontak yang mereka lakukan dengan pejabat-pejabat administrasi, kelompok-kelompok kenpentingan dan lain sebagainya. Lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif memegang peranan yang krusial dalam pembuatan keputusan kebijakan. Suatu undang-undang atau kebijakan baru, akan sah apabila telah disahkan oleh lembaga legislatif³⁶.

- Yudikatif

Badan yudikatif di Indonesia, menurut undang-undang dasar sebenarnya memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar dalam proses

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, Hlm 130

pembentukan kebijakan publik melalui pengujian kembali undang-undang atau peraturan. Pada dasarnya, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut melawan atau bertentangan dengan konstitusi Negara, maka badan yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan³⁷.

b. Aktor Tidak Resmi

- **Kelompok-kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan merupakan kelompok tidak resmi yang memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan publik hampir di semua negara. Namun, kelompok-kelompok kepentingan di negara demokratis lebih dapat memainkan peranan penting mereka dengan kegiatan yang terbuka karena mereka memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi, serta juga memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam politik. Namun, semua kelompok kepentingan memiliki fungsi yang sama yaitu menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, menyatakan tuntutan-tuntutan, dan menyarankan alternatif kebijakan. Selain itu, kelompok kepentingan juga memberikan informasi kepada pejabat-pejabat publik dan sering kali informasi yang diberikan bersifat teknis

³⁷ *Ibid*, Hlm. 129

mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan. Dengan demikian, kelompok kepentingan telah memberikan sumbagan rasionalitas bagi pembentukan kebijakan³⁸.

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada banyak faktor yang menyangkut ukuran-ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang-orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku pejabat pemerintahan, dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik. Selain itu, pengaruh kelompok kepentingan dalam pembuatan keputusan ditentukan pula oleh pandangan yang ditujukan terhadap kelompok tersebut³⁹.

- Partai Politik

Dalam masyarakat modern, partai-partai politik sering kali melakukan agregasi kepentingan dimana partai-partai politik tersebut berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Ukuran partai politik yang bersangkutan akan menentukan cara partai politik tersebut dalam mengagregasikan kepentingan.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 131-132

³⁹ *Ibid*,

- Warga negara

Warga negara sebagai individu, memanglah memiliki peranan yang dapat dikatakan rendah dalam penyusunan kebijakan publik. Namun hal tersebut masih cukup berpengaruh mengingat bahwasannya dalam sistem negara demokrasi, warga negara memiliki keterlibatan untuk memilih wakilnya di legislatif serta warganegara sebagai individu juga turut memberikan suaranya dalam pemilu yang menentukan jabatan eksekutif. Pemberian suara merupakan suatu metode yang penting dari pengaruh warga negara dalam penentuan kebijakan karena hal ini memungkinkan warga negara untuk memilih para pejabat yang kemudian akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Aktor resmi yang terlibat di dalam setiap proses perumusan kebijakan publik memanglah memiliki peranan yang sangat berarti didalam sebuah pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik jika dibandingkan dengan aktor tidak resmi. Peranan yang sangat vital yang dipegang oleh aktor resmi inilah yang menyebabkan sebuah kebijakan publik sarat akan muatan-muatan politis mengingat orang-orang yang berada di dalam kelompok ini memiliki latar belakang politik dan kepentingan-kepentingan yang berbeda, khususnya bagi eksekutif dan legislatif yang memiliki peranan utama dalam proses perumusan kebijakan publik.

Meskipun berada dalam kelompok aktor resmi dalam sebuah perumusan kebijakan publik, kalangan agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetaplah memiliki stratifikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Stone dalam Budi Prasetyo. Menurut Stone, perumusan kebijakan menempatkan suatu sistem yang mana pejabat publik merumuskan suatu kebijakan dalam konteks yang secara strategis mempunyai sumber daya yang amat penting, yaitu susunan hierarki atau *hierarchy arrange*. Oleh karena itu, berkenaan dengan kebijakan publik, maka pejabat publik keberadaannya amat bergantung pada kepentingan strata kekuasaan yang lebih tinggi. Stone juga menjelaskan bahwa perilaku pejabat publik merupakan asumsi dasar dimana pejabat publik berusaha mengejar apa yang menjadi kepentingan mereka yang kemudian menghasilkan suatu relasi dimana tingkatan jabatan tertinggi akan lebih diuntungkan daripada kepentingan strata yang paling rendah⁴⁰.

Sehingga, berdasarkan pada hal tersebut seorang pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu kalangan eksekutif memiliki kekuatan terbesar dalam proses perumusan sebuah kebijakan publik. Sehingga, dalam proses perumusan kebijakan publik kalangan eksekutif memiliki akses yang paling luas untuk menentukan *agenda setting* yang merupakan tahapan untuk menganalisis seberapa besar permasalahan di dalam masyarakat yang akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik. Penentuan *agenda setting* merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik karena hal ini menyangkut pada kepentingan politik atau *political will* rezim yang sedang berkuasa.

⁴⁰ Budi Prasetyo, *Loc.Cit*, Hlm. 33-34

2.2.2 Pariwisata

Perkembangan zaman yang semakin dinamis mendorong manusia untuk memanfaatkan waktu dan tenaga yang mereka miliki untuk melakukan hal-hal yang bersifat produktif. Tuntutan akan produktivitas tersebut, membuat manusia memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk bekerja dan terus bekerja guna meningkatkan produktivitas. Tuntutan tersebut kemudian mendorong manusia ke dalam kejenuhan dan kebosanan untuk bekerja. Oleh Karena hal tersebut, manusia sangat membutuhkan rehat sejenak dari aktivitas mereka sehari-hari dengan cara berwisata. Berwisata pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia guna menyegarkan kembali jiwa maupun otak yang sebelumnya telah digunakan secara terus-menerus untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

Berwisata, pada saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan tingkat stress masyarakat. Bahkan dewasa ini banyak sekali masyarakat yang menjadikan berwisata sebagai hobi yang mereka lakukan. Bahkan sebagian orang menganggap berwisata sebagai suatu bagian dari pekerjaan misalnya seperti seorang *travel blogger* yang banyak mengulas lokasi-lokasi wisata yang telah mereka kunjungi untuk dibagikan kepada masyarakat melalui blog yang mereka miliki.

Berwisata sangat erat kaitannya dengan pariwisata itu sendiri. Menurut WTO atau World Tourism Organization dalam Richardson dan Flicker, yang

kemudian dikutip oleh Pitana dan Diarta dalam Pengantar Ilmu Pariwisata, Pariwisata didefinisikan sebagai⁴¹ :

“The activities of persons traveling and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”

Berdasarkan pada definisi tersebut, dapat diketahui bahwasannya pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut tinggal untuk sementara di luar lingkungan yang biasa ia tinggal. Dengan catatan, orang tersebut tinggal tidak lebih dari satu tahun baik itu untuk bersenang-senang, tujuan bisnis, maupun tujuan yang lainnya. Jadi berdasarkan definisi tersebut, ditekankan bahwa pariwisata berdurasi kurang dari satu tahun berturut-turut dan tidak memperhatikan tujuannya.

Kemudian, Weaver dan Opperman dalam Pitana, juga turut mendefinisikan Pariwisata sebagai⁴² :

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourists, business suppliers, host government, host communities, origin governments, universities, community colleges, and non-governmental organizations, in the process of attracting transporting, hosting, and managing these tourists and other visitors”

Pada definisi yang dikemukakan oleh Weaver dan Opperman yang kemudian dikutip oleh Pitana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui jika Weaver dan Opperman dalam mendefinisikan pariwisata

⁴¹ I Gde Pitana, *et.al* (2009) *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI, Hlm. 45

⁴² *Ibid*,

lebih menekankan hubungan antara wisatawan, pebisnis, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, universitas selaku akademisi, serta NGO dalam mengelola para wisatawan selama mereka melakukan kegiatan berwisata di suatu tempat. Menurut definisi ini, maka dapat diketahui jika sektor pariwisata memiliki kaitan dengan sektor-sektor lain seperti sektor bisnis atau sektor swasta selaku penyedia layanan akomodasi para wisatawan selama melakukan kegiatan wisata, dengan pemerintah ataupun pemerintah daerah selaku pembuat regulasi dan kebijakan mengenai pariwisata tersebut, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelayanan wisata kepada wisatawan dan NGO yang dapat mendampingi masyarakat dalam mengelola potensi pariwisata di lingkungannya agar bermanfaat bagi banyak pihak.

Tidak seperti wisatawan, pendefinisian pariwisata lebih ditekankan pada segi aktivitas atau kegiatan para wisatawan selama melaksanakan perjalanan wisata. Semua definisi yang diungkapkan mengenai pariwisata memanglah berbeda-beda. Namun setidaknya terdapat beberapa unsur pokok yang selalu dikemukakan dalam setiap pendefinisian istilah pariwisata. Menurut Richardson and Fluker dalam Pitana, unsur-unsur tersebut antara lain⁴³ :

- a. Adanya unsur *travel* (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain
- b. Adanya unsur 'tinggal sementara' di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal biasanya

⁴³ *Ibid*, Hlm. 46

- c. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan atau pekerjaan di tempat yang dituju

Berdasarkan pada unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam pariwisata terdapat perpindahan untuk sementara waktu dari tempat yang biasa manusia tersebut tinggal ke sebuah tempat baru untuk sementara waktu dengan berbagai tujuan misalnya untuk mencari hiburan atau urusan pekerjaan. Jika seseorang melakukan perpindahan dari tempat yang biasa ia tinggal menuju ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dan mencari penghidupan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pariwisata.

Selanjutnya, Mathieson dan Wall dalam Pitana mengemukakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen, antara lain⁴⁴ :

1. *A dynamic element*, yaitu melakukan perjalanan (*travel*) ke suatu destinasi wisata;
2. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan;
3. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (*a dynamic element dan a static element*) khususnya pada masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan,

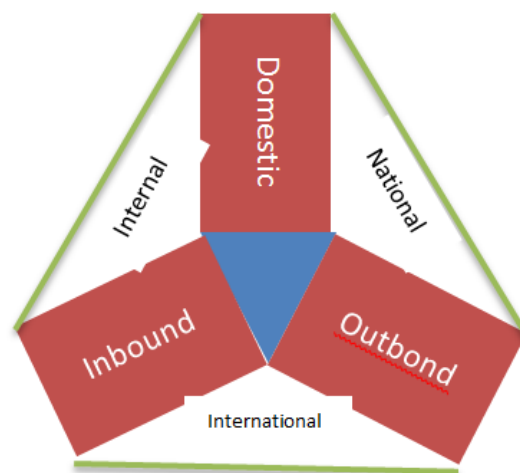
Ketiga unsur yang telah disebutkan diatas merupakan unsur yang mendasar dalam pariwisata. Dari ketiga elemen tersebut maka dapat diketahui

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 46

bahwasannya pariwisata meliputi perjalanan ke sebuah destinasi wisata, singgah di daerah tujuan, dan kemudian dari kedua kegiatan tersebut timbullah beberapa dampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi destinasi wisata atau daerah yang disinggahi oleh wisatawan. Berbagai dampak dapat ditimbulkan dari kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan bagi masyarakat lokal, dampak-dampak tersebut meliputi dampak sosial dan ekonomi yang kemudian mendorong terjadinya suatu perubahan sosial pada masyarakat tersebut akibat adanya kegiatan pariwisata di lingkungan mereka.

UN-WTO atau *United Nations Organizations* merupakan organisasi pariwisata dunia dibawah naungan PBB untuk menangani masalah pariwisata. Sebagai organisasi yang menangani masalah pariwisata, UN-WTO menyebutkan elemen-elemen mendasar dalam pendefinisian pariwisata serta kombinasi dan turunan dari elemen tersebut yang digambarkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.3 : Bentuk-bentuk Pariwisata



Sumber : WTO, dalam Pitana (2009), Hlm. 52

Kemudian berdasarkan pada gambar tersebut, UN-WTO menyebutkan bahwasannya terdapat 3 elemen mendasar dalam pengertian pariwisata secara holistik sebagaimana yang dikutip oleh Theobald dalam Pitana, 3 elemen dasar tersebut antara lain⁴⁵:

1. *Domestic tourism*

Domestic tourism merupakan residen atau penduduk yang mengunjungi atau mengadakan perjalanan wisata dalam wilayah negaranya.

2. *Inbound tourism*

Inbound tourism merupakan non-residen atau bukan penduduk yang mengadakan perjalanan wisata dan masuk ke wilayah negara tertentu.

3. *Outbond tourism*

Outbond tourism merupakan residen atau penduduk yang melakukan perjalanan wisata ke tempat lain.

Kemudian, ketiga bentuk pariwisata ini dikombinasikan dan diturunkan lagi ke dalam tiga kategori, yaitu⁴⁶ :

1. *Internal tourism*, dimana didalamnya termasuk *domestic tourism* dan *inbound tourism*
2. *National tourism*, dimana didalamnya terdapat *domestic tourism* dan *outbond tourism*

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 50

⁴⁶ *Ibid*,

3. *International tourism*, dimana di dalamnya terdapat *inbound tourism* dan *outbound tourism*.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada saat melakukan proses penyusunan penelitian, tentunya peneliti memiliki acuan penelitian yang berasal dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Kemudian, penelitian terdahulu tersebut selain dijadikan sebagai acuan penelitian, juga dapat digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan tidak memiliki kesamaan. Penelitian ini, juga memiliki beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembandingan. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan pembandingan atas penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
Reza Budi Firmansyah	“Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Kawasan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan Kabupaten Bojonegoro” (2007)	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus masalah, dimana penelitian ini akan lebih membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk sektor pariwisata serta keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan tersebut.
Agustang	“Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo” (2014)	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pembahasan, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai penyusunan Perda tentang APBD di Kabupaten Wajo, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini, lebih menganalisis pada formulasi kebijakan

			pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata serta aktor-aktor yang terdapat dibalik kebijakan tersebut
Soedarso, Muchammad Nurif, Windiani	“Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam dengan Pendekatan <i>Marketing Places</i> (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)” (2014)	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pembahasan, dimana penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai potensi dan kendala pengembangan pariwisata serta kebijakan-kebijakan di sektor pariwisata yang dirasa belum maksimal, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini, lebih menganalisis pada peranan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Reza Budi Firmansyah dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Kawasan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan Kabupaten Bojonegoro” yang dilakukan pada tahun 2007⁴⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan oleh Reza Budi Firmansyah memfokuskan penelitiannya pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro, serta menguraikan faktor pendorong dan penghambat perkembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

Meskipun memiliki metode yang sama, namun dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program yang telah dibuat, yaitu “Ayo Wisata ke Bojonegoro” . Penelitian ini juga akan membahas mengenai peranan aktor-aktor yang terdapat dibalik kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu kedua yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Agustang yang berjudul Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten

⁴⁷ Reza Budi Firmansyah (2007) *Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Kawasan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan Kabupaten Bojonegoro*, Malang : Skripsi Universitas Brawijaya

Wajo)⁴⁸. Skripsi ini terbit pada tahun 2016 dan dipublikasi oleh Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo dan mengemukakan respon masyarakat terhadap formulasi perda tersebut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustang terletak pada substansi kebijakan yang diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, dengan meneliti kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di sektor Pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” serta peranan aktor dibalik kebijakan tersebut. Jika pada penelitian yang telah dilakukan oleh Agustang juga turut mengemukakan respon masyarakat mengenai kebijakan tersebut, maka penelitian ini tidak mengemukakan respon masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojoengoro di sektor pariwisata. Namun, fokus permasalahan yang dibahas, yakni mengenai analisis formulasi kebijakan, kedua penelitian ini akan sama-sama meneliti mengenai formulasi kebijakan dengan pendekatan aktor kebijakan publik.

Penelitian terdahulu ketiga yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Soedarso, Muchammad Nurif, dan Windiani yang berjudul Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam dengan Pendekatan *Marketing Places* (Studi Kasus Pengembangan

⁴⁸ Agustang (2016) *Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo*. Diunduh dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3815/1/agustan.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2017

Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Jurnal Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 November 2014⁴⁹.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Soedarso, dkk terletak pada *locus* dan teori yang digunakan. Jika Soedarso menggunakan pendekatan *Marketing Places* dalam penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan publik dan *policy network* dengan menggunakan pendekatan aktor kebijakan untuk menganalisa mengenai peranan dan kepentingan aktor dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didalam sebuah penelitian dibuat dengan tujuan supaya pembahasan dan masalah dalam penelitian tidak meluas dan terfokus pada objek penelitian yang akan dilakukan. Hingga pada akhirnya penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini. Penggunaan teori dan kerangka konseptual dalam penelitian ini, telah ditinjau kegunaan dan kaitannya dengan judul penelitian.

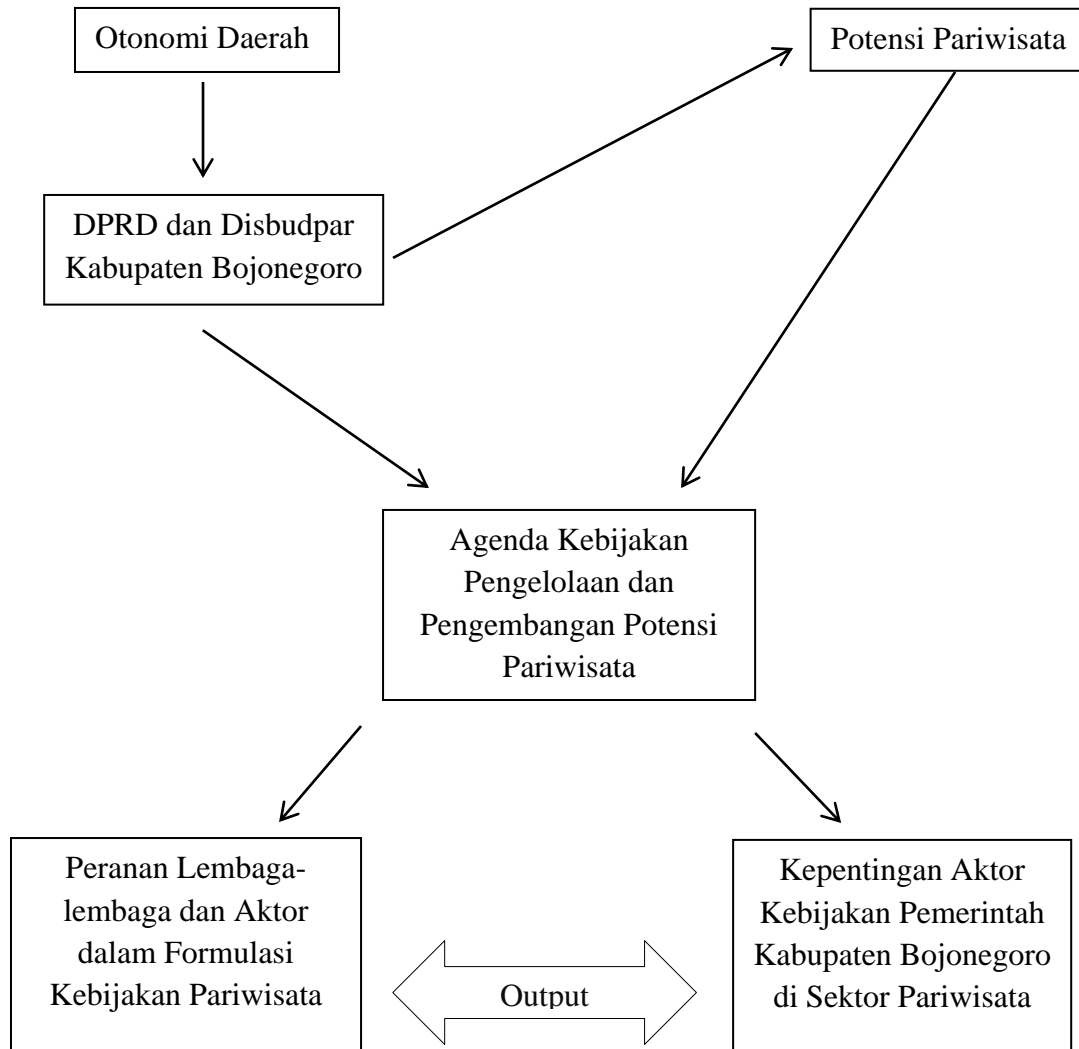
Dewasa ini, sektor pariwisata telah bertransformasi menjadi sektor yang cukup menjanjikan manfaat dan keuntungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Tidak heran, jika mulai banyak sekali daerah-daerah yang berusaha

⁴⁹ Soedarso, *et.al*, (2014), Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam dengan Pendekatan Maketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No.2

untuk memaksimalkan pengembangan potensi wisatanya, termasuk Kabupaten Bojonegoro yang dulunya dikenal sebagai daerah yang miskin objek wisata. Penelitian ini, akan menggunakan teori kebijakan publik. Dalam melakukan analisis, peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” melalui pendekatan aktor kebijakan yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pariwisata, khususnya pada tahap formulasi kebijakan di Kabupaten Bojonegoro tersebut. Proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, pastilah memiliki banyak sekali unsur-unsur politis mengingat aktor-aktor perumus kebijakan itu sendiri juga merupakan aktor politik yang ikut terlibat dalam perumusan kebijakan.

Pada akhirnya, *output* dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana peneliti juga dapat mengetahui bagaimana peranan dan kepentingan yang dimiliki oleh para aktor-aktor kebijakan, yaitu pihak legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro maupun sektor swasta yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata tersebut.

Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini, membahas dan menganalisis mengenai analisis formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan potensi pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yang telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama beberapa tahun kebelakang. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, penelitian dengan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif akan sangat sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Oleh karena itu, dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data agar peneliti mampu menggali informasi yang lebih dalam mengenai interpretasi individu yang ditelitinya. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan dalam latar sosial dan kebiasaan individu yang berada di dalam latar sosial tersebut. Peneliti kualitatif sering kali meneliti mengenai hubungan antara teori dan praktik sosial dengan berusaha menemukan pola-pola umum yang berlaku di masyarakat⁵⁰.

⁵⁰ Nanang Martono (2015), *Metode Penelitian : Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm. 212

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai suatu metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan suatu metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti⁵¹. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti⁵². Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri bertindak sebagai instrumen sehingga dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *human instrument*, yang berarti peneliti yang bertindak sebagai instrument penelitian itu sendiri⁵³.

Alasan peneliti untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena yang terjadi. Kemudian, metode deskriptif kualitatif juga dapat menjelaskan secara terperinci mengenai temuan-temuan yang ada di lokasi penelitian. Metode ini kemudian juga dapat mengeksplorasi fenomena dengan lebih luas untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

⁵¹ Haris Herdiansyah (2011), *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, Hlm. 8

⁵² *Ibid*, Hlm. 14

⁵³ Muhammad Idrus (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Hlm, 21

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang telah diajukan. Lokasi penelitian tersebut berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

- a. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk bertemu dengan Ketua serta anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dapat diwawancarai terkait pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro serta kebijakan yang telah diambil;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro selaku pimpinan atau informan lain yang berwenang dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang dapat menjelaskan mengenai upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro serta kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah;
- c. Objek pariwisata unggulan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark, dan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo selaku sektor swasta pengelola objek wisata.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibutuhkan dalam sebuah penelitian supaya pembahasan yang ada di dalam sebuah penelitian tidak meluas, sehingga penelitian dapat terfokus pada pembahasan yang telah ditentukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peranan aktor dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”
- b. Kepentingan aktor dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan informasi. Kemudian, informasi yang telah berubah menjadi sebuah data, diolah dan dianalisis melalui metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Data yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian, akan diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif, bentuk data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah berupa kalimat atau narasi dari subjek penelitian⁵⁴. Oleh karena itu, peneliti harus cermat dalam menentukan teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian

⁵⁴ Haris Herdiansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 116

kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah berupa studi literatur, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Tujuan utama dari wawancara adalah mendapatkan jawaban atau informasi yang diperlukan oleh peneliti dari informan yang diwawancarai⁵⁵. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh sebagai hasil dari wawancara dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro informan lain yang berwenang dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sebagai informan kunci akan dijadikan sebagai data primer. Sehingga, dalam penelitian ini, wawancara akan berbentuk sebagai wawancara terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan yang telah dilakukan. Peneliti juga mengajukan pertanyaan wawancara berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Sehingga, wawancara akan memuat pokok-pokok informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti dan informasi-informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 364

b. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut, beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif dari individu yang terlibat⁵⁶. Observasi dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai data primer yang dapat melengkapi data yang diperoleh dari hasil analisis wawancara yang dilakukan. Observasi akan dilakukan di beberapa objek wisata di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark, serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dengan mengamati perkembangan objek wisata setelah adanya program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yang telah dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan langkah awal untuk memperkaya atau mengembangkan pengetahuan dan argumentasi peneliti mengenai masalah sosial atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan⁵⁷. Penelitian ini menggunakan beberapa buku sebagai sumber literatur yang dinilai sesuai dengan relevan dengan topik penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. salah satu buku yang dipilih untuk dijadikan sebagai salah satu literatur yaitu

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 131-132

⁵⁷ Nanang Martono, *Op.Cit.*, Hlm 298

buku yang berjudul “Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia” yang ditulis oleh Drs. Bambang Sunaryo, M.Sc., MS pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa foto atau gambar, laporan keuangan, undang-undang, dan sebagainya⁵⁸. Dalam penelitian ini, dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder yang berguna untuk menunjang penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan tujuan dan substansi penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan pada saat peneliti melaksanakan wawancara dengan informan pendukung dan pada saat peneliti berada di tiga objek wisata yang dipilih, yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo untuk mendokumentasikan keadaan ketiga objek wisata tersebut.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 80

3.5 Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara rinci dalam proses penelitian. Informan dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai berbagai hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Informan dalam sebuah penelitian memiliki peranan seperti : menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti; memperkenalkan atau menghubungkan peneliti dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang sama; menyediakan akses dan meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai berbagai hal di lokasi penelitian; dan membantu menafsirkan makna pengamatan peneliti⁵⁹.

Pemilihan informan dalam sebuah penelitian dengan metode kualitatif pada umumnya telah ditentukan sebelum penelitian dilaksanakan. Pemilihan informan untuk pengambilan data penelitian dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional supaya informasi yang diberikan oleh informan dapat sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Sehingga, informan yang dipilih dalam penelitian ini telah ditetapkan sebelumnya sehingga informan yang berkaitan dengan topik penelitian dan dapat membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dan fokus penelitian tidak meluas.

Informan dalam sebuah penelitian kualitatif, dibedakan menjadi dua jenis yaitu Informan Kunci dan Informan Pendukung. Informan kunci merupakan informan yang menjadi sumber informasi utama dalam proses penelitian. pemilihan informan kunci tidak dapat dilakukan secara acak. Peneliti harus

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm 120

menentukan kriteria orang yang layak untuk dijadikan sebagai informan kunci. Pemilihan informan kunci merupakan hal yang sangat penting sekaligus akan menentukan validitas data serta hasil penelitian. Peneliti harus berhati-hati dalam menentukan informan kunci supaya penelitian tidak mengandung bias karena salah menentukan informan⁶⁰. Untuk penentuan informan kunci, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana untuk menentukan sampel penelitian, dilakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu supaya data yang diperoleh lebih representatif. Penentuan informan kunci dengan menggunakan metode *purposive sampling* juga bertujuan supaya informan yang diwawancarai dalam penelitian ini benar-benar mengerti mengenai tahapan dalam proses formulasi kebijakan publik, khususnya pada tahapan *agenda setting*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka informan dalam penelitian ini adalah aktor yang benar-benar terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro, yaitu dari pihak legislatif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Informan pendukung atau informan tambahan merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan fokus penelitian. Untuk menentukan informan tambahan, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dimana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan informan dan dari informan inilah akan dikembangkan lagi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh informan tersebut⁶¹.

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 117-119

⁶¹ Sugiyono (2010), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung : Alfabeta Hlm. 87

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, peranan aktor yang merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”, serta yang *Kedua* adalah kepentingan aktor yang merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Sehingga, dari ketiga fokus tersebut, dapat ditentukan informan kunci dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

- a. Pihak legislatif, yang diwakili oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro selaku Komisi yang membidangi sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro, Bapak Sigit Kushariyanto., S.E., MM yang terlibat aktif dalam perumusan kebijakan untuk sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro sekaligus sebagai aktor dalam perumusan kebijakan.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang kemudian diwakili oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti., S.E., MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya sebagai instansi pelaksana kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan instansi yang membidangi pengelolaan dan promosi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak yang merasakan dan mengetahui secara langsung mengenai keadaan objek wisata di

Kabupaten Bojonegoro serta dampak dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro di sektor pariwisata. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pengelola objek wisata unggulan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark, serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo selaku pihak yang merasakan dan mengetahui secara langsung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata serta pedagang di ketiga objek wisata tersebut selaku warga atau masyarakat yang terkena dampak langsung dengan adanya kegiatan pariwisata di sekitarnya.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen secara umum merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penilaian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut. Dalam makna luas, instrumen penelitian merujuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Sehingga, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian⁶².

Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara memuat mengenai daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Pedoman wawancara ini akan memuat pokok-pokok penelitian yang akan ditanyakan melalui proses

⁶² Nanang Martono, *Loc.Cit*, Hlm. 122-123

wawancara dengan informan. Sehingga, sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti membuat pedoman wawancara untuk dijadikan sebagai acuan ketika melaksanakan wawancara untuk menghindari bias informasi. Namun proses wawancara tidak hanya terfokus pada pedoman wawancara yang telah disusun sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan kepada informan untuk menambah informasi yang diperoleh peneliti.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi memuat mengenai hal-hal yang akan diamati di lokasi penelitian sehingga akan menghasilkan informasi yang dapat diolah untuk dijadikan sebagai data primer yang dapat melengkapi hasil wawancara. Pedoman observasi diperlukan supaya observasi di lokasi penelitian menjadi terfokus.

c. Notulensi

Notulensi dalam sebuah pelaksanaan penelitian menjadi sangat penting bagi peneliti untuk mencatat temuan-temuan dan hasil pengamatan di lokasi penelitian pada saat peneliti melaksanakan penelitian. Notulensi ini akan berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih sehingga notulensi ini merupakan bagian dari data primer.

d. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi diperlukan dalam sebuah penelitian supaya dokumen-dokumen yang dikumpulkan merupakan dokumen yang

relevan dan dapat menunjang penelitian. Pedoman dokumentasi akan menganalisis data yang diperoleh dari buku, gambar atau foto, laporan keuangan, dan sebagainya.

e. Perekam Suara

Perekam suara akan digunakan pada saat peneliti melaksanakan wawancara dengan informan. Dengan adanya alat perekam suara, wawancara antara peneliti dengan informan akan terekam dengan baik sehingga peneliti tidak kehilangan informasi yang telah diperoleh dari informan. Dengan adanya rekaman wawancara maka peneliti juga lebih dapat memahami secara mendalam informasi yang telah diperoleh sebagai hasil wawancara.

3.7 Sumber Data

Seorang peneliti, ketika melakukan penelitian harus mampu menghasilkan informasi yang diperoleh dari informan. Kemudian, informasi tersebut dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam sebuah penelitian, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Martono, data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama yaitu responden atau informan melalui proses wawancara atau melalui hasil pengamatan

yang dilakukan sendiri oleh peneliti⁶³. Sehingga dalam penelitian ini data yang dijadikan sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari : 1.) Hasil wawancara peneliti dengan : a.) Pihak Legislatif yaitu Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro selaku komisi yang membidangi sektor Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro Bapak Sigit Kushariyanto., S.E., MM yang terlibat aktif dalam perumusan kebijakan untuk sektor pariwisata serta sebagai aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakna sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro; b.) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang kemudian diwakili oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti., S.E., MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya sebagai instansi pelaksana kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan instansi yang membidangi pengelolaan dan promosi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro, 2.) Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi wisata yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark, serta Agro Belimbing Ngringinrejo. 3.) Notulensi atau catatan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data

⁶³ *Ibid*, Hlm. 65

primer⁶⁴. Sehingga pada umumnya data sekunder hanya berupa dokumen-dokumen pendukung penelitian yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian ini adalah berupa : a.) Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, jurnal, atau karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian; b.) Wawancara singkat peneliti dengan pengelola objek wisata Kayangan Api, Dander Waterpark, dan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo di Kabupaten Bojonegoro; c.) Dokumentasi yang diperoleh peneliti dari pengumpulan data di lokasi penelitian, dokumentasi dapat berupa foto atau gambar, laporan keuangan, peraturan daerah, dan lain-lain.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, dalam Sugiyono analisis data adalah⁶⁵ :

“ proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan ”

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 67

⁶⁵ Sugiyono, *Loc.Cit*, Hlm. 333-336

Data yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan potensi pariwisata melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro, akan dikumpulkan dan diolah dan ditarik kesimpulan sementara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Data oleh Miles dan Huberman.

Teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman ini terdiri atas tiga tahapan atau alur yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, *display* atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan⁶⁶.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan “proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari proses pengumpulan data”⁶⁷. Pada tahapan kondensasi data, data yang telah diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian akan disaring sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga nantinya setelah tahapan reduksi data selesai, data yang dihasilkan adalah data *final* yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan oleh peneliti.

Tahapan kondensasi data sebenarnya juga merupakan tahapan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagaimana data dikode,

⁶⁶ Matthew B. Miles, *et.al* (2014), *Qualitative Data Research A Methods Sourcebook Edition 3*, London : SAGE Publications, Hlm. 31-33

⁶⁷ Ibid,

dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, merupakan pilihan analitis dari peneliti sendiri. Dengan begitu, proses kondensasi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi⁶⁸.

2. *Display Data*

Setelah tahapan kondensasi data dan diperoleh data final dari sebuah penelitian, maka tahapan selanjutnya adalah *display* data atau penyajian data. Penyajian data dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai “sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”⁶⁹. Pada tahapan ini, peneliti akan menganalisis data *final* yang telah disajikan dengan teori dan konsep yang digunakan didalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai “penarikan arti dari data yang telah disajikan dan analisis menggunakan teori dan konsep yang digunakan didalam

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 150

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 151

penelitian”⁷⁰. Kemudian, selain penarikan kesimpulan juga dilakukan verifikasi untuk meninjau kembali hasil penelitian dan memastikan bahwa data hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih telah tersaji dan terpaparkan secara lengkap serta memastikan kesimpulan yang diambil atau ditarik telah sesuai dengan data dan analisis yang diperoleh.

3.9 Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian wajib untuk dilakukan supaya data yang diperoleh peneliti ketika melaksanakan penelitian di lapangan menjadi lebih akurat. Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh ketika melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Menurut Lexy J. Moloeng, triangulasi adalah⁷¹ :

“teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Kemudian, triangulasi sumber data berarti pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan cara membandingkan dan memeriksa ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda”

Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berarti pengecekan atau pemeriksaan kembali hasil wawancara dengan beberapa informan dan dokumen atau hasil observasi yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian.

⁷⁰ *Ibid*,

⁷¹ Lexy J. Moeloeng (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Hlm. 350

Uji keabsahan data nantinya akan berkaitan dengan validitas dan keakuratan data yang diperoleh. Sehingga dari uji keabsahan data ini akan diperoleh data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan di dalam penelitian. Uji keabsahan data juga akan meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan karena data yang diperoleh dan disajikan telah diuji keabsahannya.

BAB IV

PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah daerah yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro berdiri pada tanggal 20 Oktober 1677 dengan nama Kabupaten Jipang dengan Bupati pertama Raden Mas Tumapel⁷². Kemudian tanggal 20 Oktober ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah mencapai 230.706 Ha. Hingga pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro secara administratif terbagi menjadi 28 Kecamatan dengan 419 Desa dan 11 Kelurahan⁷³.

Kabupaten Bojonegoro lebih dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia karena Kabupaten Bojonegoro memiliki Potensi migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Kabupaten Bojonegoro sendiri, dialiri oleh Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai Bengawan Solo mengalir beberapa Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari ujung barat yaitu di Kecamatan Padangan, yang kemudian mengalir menuju kearah timur yang berakhir di Kecamatan Baureno.

⁷² Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Sejarah Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/sejarah> tanggal 16 Januari 2018

⁷³ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/geografi> tanggal 16 Januari 2018

Kabupaten Bojonegoro sebenarnya memiliki banyak sekali destinasi wisata yang dapat diunggulkan mengingat potensi wisata di Kabupaten Bojonegoro masih belum banyak yang dikembangkan dengan baik. Potensi wisata yang dimiliki oleh kabupaten Bojonegoro belum dapat berkembang dengan optimal karena pemerintah Kabupaten Bojonegoro baru mulai mengembangkan sektor pariwisata pada tahun 2015, sehingga efek dari upaya pengembangan tersebut belum terlihat secara nyata, namun ada peningkatan kearah yang lebih positif. Belum berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro juga dipengaruhi oleh fokus utama pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana hingga pada saat ini pemerintah masih memiliki fokus utama pada sektor pertanian dan migas yang dapat dilihat dari visi Kabupaten Bojonegoro yaitu “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Bahagia, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan perkembangan yang dibuktikan dengan bertambahnya objek wisata di Kabupaten Bojonegoro. Hingga pada tahun 2017, Kabupaten Bojonegoro telah memiliki 21 objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro⁷⁴. Objek wisata di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya merupakan wisata berbasis alam seperti desa wisata, agrowisata, dan wisata alam lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melaksanakan peranannya dengan baik sebagai regulator yang memberikan

⁷⁴ Wawancara Dyah Enggarini Mukti, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2018) pada tanggal 16 Januari 2018

kemudahan perizinan terkait kepariwisataan seperti perizinan pendirian hotel, restaurant, *travel agent*, dan lain-lain.

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro

Visi dan misi merupakan sebuah hal yang sangat penting mengingat dalam visi dan misi ini akan memuat mengenai tujuan dari sebuah organisasi. Visi dan misi dibutuhkan supaya tujuan, capaian, dan harapan yang diinginkan dalam suatu lingkup organisasi dapat diperjelas, sehingga kinerja sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi tersebut dapat terpacu kearah yang lebih baik dan dapat memenuhi tujuan, capaian, dan harapan yang diinginkan.

Kabupaten Bojonegoro memiliki Visi yang berbunyi sebagai berikut⁷⁵ :

“TERWUJUDNYA PONDASI BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, BAHAGIA, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Berdasarkan visi yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro mengharapkan terciptanya Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Sehingga, melalui visi ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selalu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro terutama di sektor pertanian dan sektor migas yang pada saat ini menjadi fokus utama dari setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian melalui visi ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki harapan bahwa Kabupaten Bojonegoro

⁷⁵ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Visi dan Misi*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/visimisi> tanggal 16 Januari 2018

mampu menjadi lumbung pangan dan energi yang produktif dan berdaya saing, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Visi ini juga memuat mengenai harapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap masyarakatnya melalui kata-kata “adil, bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan”. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki harapan jika Kabupaten Bojonegoro berhasil menjadi lumbung pangan dan energi negeri, maka masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diharapkan akan mendapatkan keadilan, kebahagiaan serta kesejahteraan. Visi ini juga mengandung harapan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa pembangunan di sektor pertanian dan energi, keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro sendiri.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan, maka misi yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut⁷⁶ :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan industri pangan dan energi
- Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki harapan supaya industri pangan, sektor pertanian dan energi mampu mendorong perekonomian di Kabupaten Bojonegoro supaya dapat tumbuh dengan baik dan seimbang dan terus meningkat dari tahun ke

⁷⁶ *Ibid.*

tahun sehingga dari kesinambungan tersebut diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera

Misi ini mengarahkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bojonegoro menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Misi ini terwujud dalam berbagai kebijakan dan program yang akhirnya mampu mendorong kreativitas masyarakat supaya mereka lebih produktif dan mandiri yang kemudian berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang professional

Misi ini akan mengantarkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahannya sehingga diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan baik dan bebas dari praktik KKN melalui peningkatan pelayanan yang maksimal dan professional. Sehingga, dengan profesionalitas tersebut maka niscaya tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bersih.

4.3 Geografi dan Topografi Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dengan Sungai Bengawan Solo sebagai batas alam dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro memiliki lahan pertanian yang cukup subur di sepanjang DAS bengawan solo karena lahan pertanian di sepanjang DAS Bengawan Solo dapat teririgasi dengan baik. Namun jika musim penghujan tiba, maka DAS Bengawan Solo sangat beresiko terkena bencana banjir. Meskipun berada di wilayah DAS Bengawan Solo, tidak jarang pula beberapa Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kekeringan pada musim kemarau, terutama di kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro yang tidak menjadi bagian dari DAS Bengawan solo.

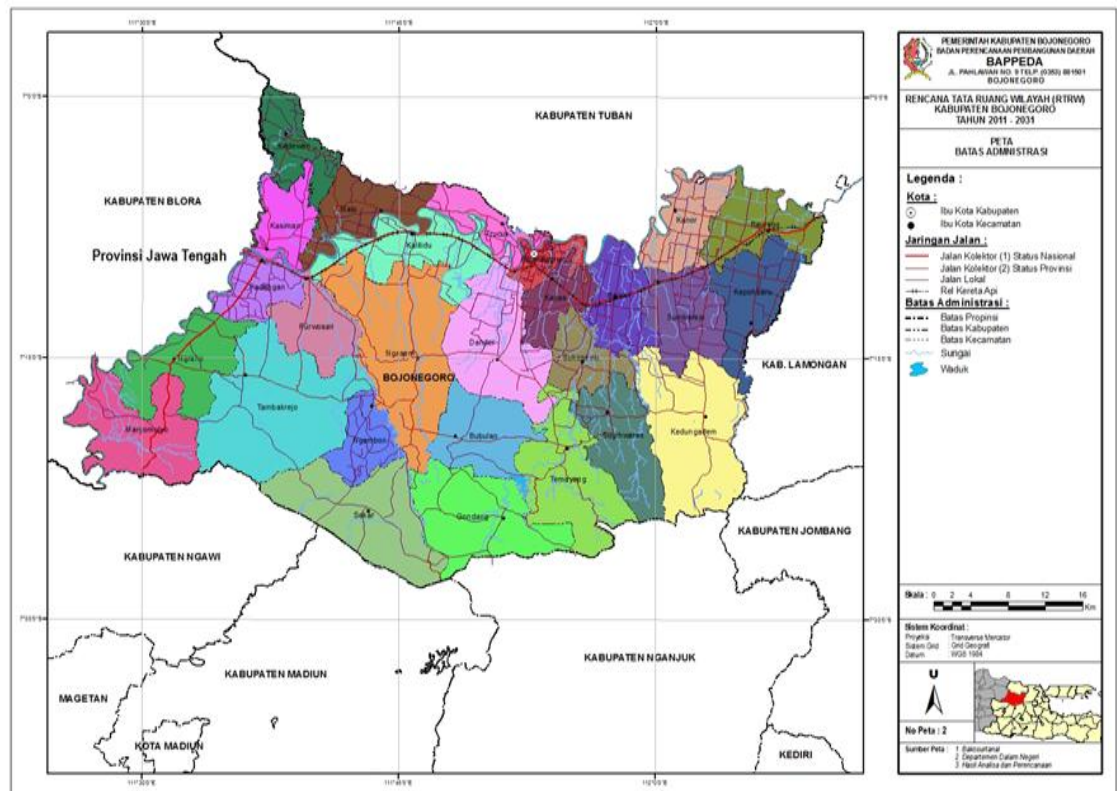
Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat Bujur Timur : 112° 25' hingga 112°09' dan Lintang Selatan 6°59' dan 7°37' dengan jarak ± 110 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut⁷⁷ :

- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah)
- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban

⁷⁷ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/geografi> tanggal 16 Januari 2018

- Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Jombang

Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2011)

Kedaaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah Utara (Pegunungan Kapur Utara) yang telah mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian subur. Wilayah di Derah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh lahan yang ada di daerah Bojonegoro, bahwa 91,26% wilayah Kabupaten Bojonegoro

memiliki kemiringan antara 0-15%. Permukaan tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro rata-rata berada pada ketinggian dari permukaan laut yang relatif sangat rendah, yaitu berada dalam ketinggian antara 25-2500m dari permukaan laut⁷⁸.

4.4 Ekonomi dan Budaya Kabupaten Bojonegoro

4.4.2 Kondisi Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dengan adanya Migas pada tahun 2015 sangat berkembang pesat serta ekonomi mampu tumbuh sebesar 19,87% mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding pada tahun 2014 hanya mencapai 2,36%. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa adanya Migas di daerah Bojonegoro mencapai 5,99%, sedikit terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 6,19%. Sebagai pembandingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mencapai 5,44% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional mencapai 4,79%⁷⁹.

Hal yang paling mendasar yang mempengaruhi progres laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah peningkatan yang sangat signifikan pada beberapa sektor produksi diantaranya adalah meningkatnya lifting Migas sebesar 40% dari tahun 2014. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil dan motor. Pertumbuhan ekonomi

⁷⁸ *Ibid*,

⁷⁹ *Ibid*,

yang ada di Kabupaten Bojonegoro sangatlah tinggi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang relatif cukup rendah di tahun 2015 yang mencapai 2,91%. Capaian inflasi tersebut relatif stabil dan masih berada dibawah inflasi yang ada di Jawa Timur dan Nasional⁸⁰.

Dari sisi kontribusi PDRB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 ini sektor pertambangan dan penggalian menempati kontributor terbesar dalam peranan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2015, yaitu mencapai 50,10% dan kemudian disusul sektor pertanian yang memiliki kontribusi mencapai 12,80%. Dari kondisi riil perekonomian daerah tersebut diatas, menunjukan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu memberikan impact yang besar dalam meningkatkan kemajuan di berbagai bidang⁸¹.

4.4.3 Budaya Kabupaten Bojonegoro

a. Masyarakat Samin

Masyarakat Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan *sedulur sikep*, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala

⁸⁰ *Ibid*,

⁸¹ *Ibid*,

peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Masyarakat ini acap memusingkan pemerintah Belanda maupun penjajahan Jepang karena sikap itu, sikap yang hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok di luarnya⁸².

Masyarakat Samin sendiri juga mengisolasi diri hingga baru pada tahun 1970-an, mereka baru tahu Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar sampai Jawa Tengah, namun konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masing-masing bermukim di perbatasan kedua wilayah. Jumlah mereka tidak banyak dan tinggal di kawasan pegunungan Kendeng di perbatasan dua provinsi. Kelompok Samin lebih suka disebut *wong sikep*, karena kata samin bagi mereka mengandung makna negatif. Orang luar Samin sering menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, tidak suka mencuri, menolak membayar pajak, dan acap menjadi bahan lelucon terutama di kalangan masyarakat Bojonegoro⁸³.

a. Wayang Thengul

Wayang Thengul merupakan salah satu kesenian yang asli Bojonegoro dan saat ini tinggal 12 dalang yang masih aktif memainkan Wayang Thengul. Salah satunya dilakukan oleh dalang Mardji Deglek secara keliling. Wayang Thengul ini berbentuk 3 dimensi dan biasanya

⁸² Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Tempat Sejarah dan Budaya*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/TempatSejarahdanBudaya> tanggal 19 Januari 2018

⁸³ *Ibid*,

dimainkan dengan iringan musik gamelan “*Pelog/Slendro*”. Wayang Thengul ini memang sudah jarang di pertunjukan lagi namun keberadaanya tetap dilestarikan terutama di Kecamatan Kanor yang berjarak kurang lebih 40 Km dari kota Bojonegoro⁸⁴.

b. Tari Tayub

Tari Tayub merupakan kesenian tradisional asal Bojonegoro yang merupakan peninggalan dari budaya leluhur yang telah memasyarakat secara turun temurun hingga sampai saat ini. Penari Tayub diperankan oleh dua orang penari sampai dengan belasan penari. Terdapat keunikan dari Tari Tayub adalah keikutsertaan para penonton untuk menari bersama dengan penari Tayub. Tarian ini biasanya diselenggarakan untuk memeriahkan acara pernikahan, khitanan atau acara keluarga lainnya. Acara tarian Tayub berlangsung selama 24 jam atau bahkan sampai dua hari, tergantung dari kemampuan penyewa tarian tersebut. Kelompok-kelompok tari Tayub ini banyak terdapat di Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Ngasem⁸⁵.

⁸⁴ Bagian Perekonomian Peta Potensi Investasi Kabupaten Bojonegoro (t.t), *Seni dan Budaya Lokal*, diakses dari <http://www.investasi-bojonegoro.unigoro.ac.id/index.php/en/produk-unggulan/seni-dan-budaya-lokal> tanggal 18 Januari 2018

⁸⁵ *Ibid*,

4.5 Potensi Wisata Kabupaten Bojonegoro

4.5.1 Objek Wisata Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai objek wisata maupun potensi wisata yang mampu menarik wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pada brosur dan booklet pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, setidaknya terdapat 14 objek wisata yang telah dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, baik itu objek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun objek wisata yang dikelola oleh desa. Objek-objek wisata tersebut antara lain⁸⁶ :

a. Kayangan Api

Gambar 4.2 : Kayangan Api⁸⁷



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

⁸⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Bojonegoro Sahabat Dunia Travel Guide : Daya Tarik Wisata Kabupaten Bojonegoro*

⁸⁷ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Kayangan Api*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/kayangan-api/> tanggal 19 Januari 2018

Kayangan Api merupakan sumber api abadi yang terletak di kawasan hutan lindung Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Kayangan Api merupakan fenomena geologi berupa gas alam yang keluar dari dalam tanah melalui zona lemah atau rekahan yang kemudian tersulut oleh api sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam meskipun diguyur hujan. Hal ini disebabkan karena di dekat titik semburan gas, terdapat mata air yang menghasilkan bau menyengat karena adanya kandungan belerang⁸⁸.

b. Dander Waterpark

Gambar 4.3 : Dander Waterpark⁸⁹



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

Dander Waterpark merupakan destinasi wisata yang berupa kolam renang dan wahana permainan air di Kabupaten Bojonegoro. Setidaknya terdapat 4 wahana permainan air yang disediakan seperti kolam arus, kolam anak, serta ada kolam renang standar nasional yang

⁸⁸ *Ibid*,

⁸⁹ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Dander Waterpark*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/dander-water-park/> tanggal 19 Januari 2018

dapat digunakan oleh pengunjung. Pada objek wisata Dander Waterpark juga terdapat beberapa tempat penjualan makanan, souvenir, serta gazebo-gazebo yang menambah kenyamanan pengunjung. Dander Waterpark juga turut menyediakan penginapan sebanyak 14 kamar dengan aula yang mampu menampung 500 orang untuk disewakan kepada wisatawan⁹⁰.

c. Waduk Pacal

Gambar 4.4 : Waduk Pacal⁹¹



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

Waduk Pacal merupakan tempat penampungan air di desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang yang dibangun pada tahun 1933 oleh pemerintahan Belanda. Waduk Pacal pada saat ini berfungsi untuk irigasi dan lokasi wisata. Pengunjung dapat menyewa perahu untuk mengelilingi waduk ataupun memancing⁹².

⁹⁰ *Ibid*,

⁹¹ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Waduk Pacal*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/waduk-pacal/> tanggal 19 Januari 2018

⁹² *Ibid*,

d. Atas Angin

Gambar 4.5 : Atas Angin⁹³



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

Atas angin merupakan lokasi wisata yang terletak di Desa Deling, Kecamatan Sekar sekitar 50km dari pusat kota Bojonegoro. Objek wisata ini memberikan pemandangan alam dari ketinggian 650 mdpl. Sehingga, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena memiliki banyak *spot* foto yang indah dari bentangan alam Bojonegoro⁹⁴.

e. Teksas Wonocolo

Gambar 4.6 : Teksas Wonocolo⁹⁵



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

⁹³ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Negeri Atas Angin*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/negeri-atas-angin-2/> tanggal 19 Januari 2018

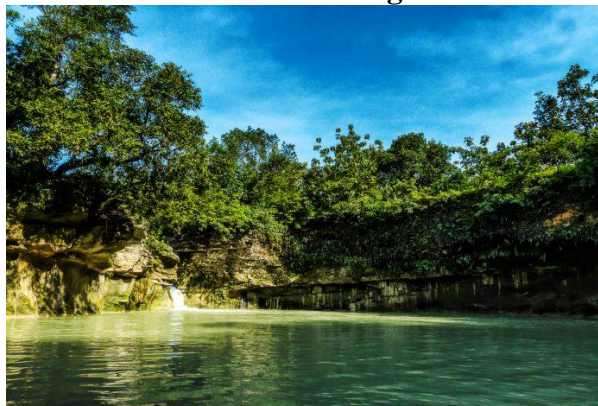
⁹⁴ *Ibid*,

⁹⁵ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Teksas Wonocolo*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/teksas-wonocolo/> tanggal 19 Januari 2018

Teksas Wonocolo merupakan objek wisata yang terletak di Kecamatan Kedewan dimana pada daerah ini terdapat penambangan minyak yang masih dikelola dengan cara tradisional. Teksas Wonocolo pada saat ini menjadi wisata edukasi tentang minyak dan cara eksploitasi minyak di Bojonegoro serta diusulkan sebagai *geosite* di dalam Petroleum Heritage Bojonegoro⁹⁶.

f. Kedung Maor

Gambar 4.7 : Kedung Maor⁹⁷



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

Kedung Maor merupakan objek wisata yang terletak di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang. Kedung Maor merupakan aliran sungai Soko yang mengalir menggerus bebatuan kapur dengan airnya yang hijau sehingga membuat tebing batuan kapur terukir secara alami oleh air yang tampak indah untuk dilihat. Kemudian bebatuan besar yang terbawa

⁹⁶ *Ibid*,

⁹⁷ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Kedung Maor*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/kedung-maor/> tanggal 19 Januari 2018

arus sungai Soko dan air terjun mini yang mengalir menghasilkan danau kecil dibawahnya⁹⁸.

g. Wisata Krondonan

Gambar 4.8 : Wisata Krondonan⁹⁹



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2017)

Wisata Banyu Kuning Krondonan merupakan objek wisata yang terletak di desa Krondonan Kecamatan Gondang. Banyu Kuning memiliki mata air yang cukup hangat dengan air yang seolah-olah berwarna kuning, namun air aslinya adalah bening. Lokasi ini dinilai berpotensi menjadi *geoheritage* atau *geopark*¹⁰⁰.

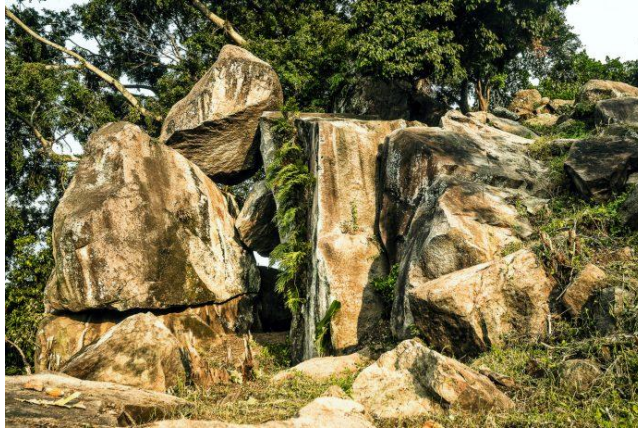
⁹⁸ *Ibid*,

⁹⁹ Bojonegoro Tourism Information Center (2017), *Geoheritage Bojonegoro*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/geoheritage-bojonegoro/> tanggal 19 Januari 2018

¹⁰⁰ *Ibid*,

h. Watu Gandul

Gambar 4.9 : Watu Gandul¹⁰¹



Sumber : Disbudpar Kabupaten Bojonegoro (2017)

Watu gantul merupakan lokasi wisata yang terletak di Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang. Watu gantul berada diantara deretan batu-batu besar yang berserak akibat letuan gunung berapi pada masa lampau. Batu-batu andesit yang memiliki ukuran besar tersebut tertata secara alami. Lokasi ini juga merupakan lokasi *geoheritage*¹⁰².

i. Tubing Growgoland

Wisata Tubing Growgoland merupakan wisata “*ngintir*” atau *rafting* di aliran sungai dengan menggunakan ban donat dengan panjang trek sekitar 300 meter. Lokasi ini berada di Desa Ngunut, Kecamatan Dander. Lokasi ini menyuguhkan keindahan jalur sungai yang airnya jernih dan dikelilingi pohon-pohon rindang. Pengunjung

¹⁰¹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Watu Gandul*, diakses dari <http://dinbudpar.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/5> tanggal 19 Januari 2018

¹⁰² *Ibid*,

juga bisa berenang di kolam renang alami yang disediakan di area perkemahan¹⁰³.

j. Agrowisata

Gambar 4.10 : Agrowisata Belimbing Ngringinrejo



Sumber : Dokumen pribadi (2018)

Kabupaten Bojonegoro memiliki tiga lokasi agrowisata antara lain Agrowisata Salak Wedi yang terletak di Desa Wedi dan Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas dengan komoditas buah salak. Kemudian terdapat Agrowisata Belimbing Ngringinrejo yang terletak di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu yang memiliki komoditas utama buah belimbing khas yang berukuran besar. Suasana kebun yang nyaman, bersih dan sejuk selalu menarik pengunjung untuk datang. Agrowisata yang ketiga adalah Agrowisata Jambu yang terletak di

¹⁰³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Bojonegoro Sahabat Dunia Travel Guide : Daya Tarik Wisata Kabupaten Bojonegoro*. Pamflet Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Dokumen diambil tanggal 16 Januari 2018

Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu dimana pengunjung bisa merasakan berkebun buah jambu biji merah¹⁰⁴.

k. Makam Wali Kidangan

Wisata religi makam Wali Kidangan berada di atas bukit dusun Kidangan, Kecamatan Malo. Makam Wali Kidangan dipercaya sebagai makam seorang ulama besar bernama Syeh Mukodar dari Kasultanan Pajang atau yang disebut dengan Wali Kidangan. Kemudian adapula yang menyebutnya dengan Pangeran Kumbang Ali-ali. Makam ini tidak pernah sepi dari peziarah terutama pada tahun baru islam atau 1 Suro¹⁰⁵.

l. Petilasan Angling Darma

Gambar 4.11 : Petilasan Angling Darma¹⁰⁶



Sumber :Mawan Sidarta (2015)

¹⁰⁴ *Ibid*,

¹⁰⁵ *Ibid*,

¹⁰⁶ Mawan Sidarta (2015), *Inilah Jejak Prabu Angling Darma di Bojonegoro*, diakses dari https://www.kompasiana.com/mawan.sidarta/inilah-jejak-prabu-anglingdarma-di-bojonegoro_54f36b66745513962b6c74f3 tanggal 20 Januari 2018

Petilasan Angling Darma berada di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu dimana pada lokasi ini terdapat tumpukan batu bata di bawah *pakon watu* yang dipercaya merupakan petilasan Prabu Angling Darma. Di lokasi tersebut terdapat tanah *embat* yang selalu basah, konon tempat tersebut adalah kolam pemandian tempat Dewi Setyawati bertemu dengan Prabu Angling Darma yang menjelma menjadi Meliwis Putih¹⁰⁷.

m. GoFun Entertainment Complex

Gambar 4.12 : GoFun Entertainment Complex¹⁰⁸



Sumber : GoFun Bojonegoro

¹⁰⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Bojonegoro Sahabat Dunia Travel Guide : Daya Tarik Wisata Kabupaten Bojonegoro*. Pamflet Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Dokumen diambil tanggal 16 Januari 2018

¹⁰⁸ GoFun Bojonegoro (2017), *Menjelang Akhir Tahun GoFun Bojonegoro Bersiap Untuk Buka Pagi Hingga Malam*, diakses dari <https://www.gofun.co.id/id/news-events/39-menjelang-libur-akhir-tahun-gofun-bojonegoro-bersiap-untuk-buka-pagi> tanggal 20 Januari 2018

Gofun Entertainment Complex merupakan objek wisata yang terletak di Kecamatan Bojonegoro, tepatnya Jalan Veteran. GoFun Entertainment Complex dibuka pada tahun 2016 yang terdiri dari *themepark*, GoFun Waterpark, GoFun Supermarket serta beberapa kafe tematik. GoFun sendiri dikelola oleh pihak swasta tanpa ada campur tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pendanaan maupun pengelolaannya.

n. Gerabah Malo

Gambar 4.13 : Gerabah Malo¹⁰⁹



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2016)

Industri gerabah Malo berada di Desa Rendeng Kecamatan Malo merupakan salah satu destinasi wisata edukasi pembuatan kerajinan gerabah. Pada saat ini gerabah dibentuk menjadi berbagai bentuk sehingga mampu menarik minat pembeli dan mampu menjadi *home industry* bagi masyarakat Desa Rendeng¹¹⁰.

¹⁰⁹ Bojonegoro Tourism Information Center (2016), *Rendeng Pusat Kerajinan Gerabah Malo*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/rendeng-pusat-kerajinan-gerabah-malo/> tanggal 19 Januari 2018

¹¹⁰ *Ibid*,

o. Alun-alun Bojonegoro

Gambar 4.14 : Alun-alun Bojonegoro



Sumber : Dokumen Pribadi (2018)

Alun-alun Bojonegoro berada di tengah kawasan Kota Bojonegoro tepatnya di Jalan P. Mas Tumapel, berhadapan langsung dengan Pendopo dan Kantor Bupati Bojonegoro. Banyak warga dan wisatawan yang berkunjung di sana terlebih setelah kawasan ini direnovasi dan ditambahkan batu prasasti yang punya cerita misteri, batu tersebut dibawa dari Desa Krondonan Kecamatan Gondang yang kemudian dinamakan Batu Semar. Kini batu semar menjadi *landmark* baru Kota Bojonegoro yang melambangkan tekad untuk terus berkarya ¹¹¹. Di dalam Alun-alun Bojonegoro pengunjung dapat bersantai menikmati suasana taman kota yang bersih dan nyaman. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas olah raga seperti *jogging track* dan lapangan olahraga.

¹¹¹ Bojonegoro Tourism Information Center (2016), *Alun-alun dan Batu Semar*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/alun-alun-dan-watu-semar/> tanggal 20 Januari 2018

p. Agroguna Bojonegoro

Gambar 4.15 : Agroguna Bojonegoro¹¹²



Sumber : Bojonegoro Tourism Information Center (2016)

Agroguna Bojonegoro adalah agrowisata sayur dan buah yang dilengkapi dengan resto sehat dan pusat oleh-oleh. Berlokasi 5 Km ke arah timur dari pusat kota, Agroguna juga menawarkan wisata petik sayur dan buah. Berbagai varietas sayur baru ada di Agroguna seperti *butternut squash*, okra merah, okra hijau, kacang panjang merah, kailan, dan selada. Sayur mayur di kebun Agroguna berbasis non pestisida kimia, sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Agroguna juga sebagai wisata edukasi pertanian, banyak anak sekolah yang melakukan kunjungan untuk belajar mengenal dan budidaya sayur dan buah¹¹³.

¹¹² Bojonegoro Tourism Information Center (2016), *Agroguna Bojonegoro*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/agroguna-bojonegoro/> tanggal 20 Januari 2018

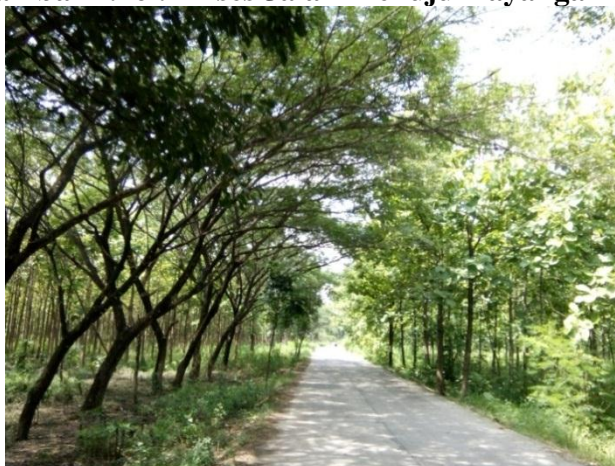
¹¹³ *Ibid*,

4.5.2 Aksesibilitas

Akses menuju Kabupaten Bojonegoro baru dapat melalui jalur darat yaitu dengan menuju ke Terminal Rajekwesi jika menggunakan moda transportasi bus atau menuju Stasiun Kereta Api Bojonegoro jika menggunakan moda transportasi kereta api. Angkutan ojek *online* seperti Grab dan Okejek juga tersedia di wilayah Kota Bojonegoro. Selain itu angkutan umum lain seperti ojek, angkot, serta becak juga tersedia selama 24 jam di Terminal Rajekwesi dan Stasiun Kereta Api.

Pada saat melaksanakan penelitian, infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, terutama infrastruktur jalan menuju objek-objek wisata yang diunggulkan di Kabupaten Bojonegoro. Namun, beberapa objek wisata masih memiliki akses jalan yang belum cukup baik. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju objek-objek wisata.

Gambar 4.16 : Akses Jalan Menuju Kayangan Api



Sumber : Dokumen Pribadi (2018)

4.5.3 Amenitas

Jumlah hotel dan akomodasi yang mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dari hari ke hari semakin bertambah jumlahnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bojonegoro serta adanya efek dari eksploitasi migas di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pada brosur Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, hingga pada tahun 2017 setidaknya terdapat 21 hotel atau penginapan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro, baik itu hotel berbintang, *guest house*, maupun hotel kelas melati. Persebaran penginapan di Kabupaten Bojonegoro masih didominasi oleh wilayah Kota Bojonegoro, dimana 17 hotel dari 21 hotel yang terdaftar dalam brosur tersebut terletak di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Tiga hotel sisanya terletak di Kecamatan Kalitidu, yang merupakan wilayah eksploitasi migas di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan satu hotel yang lain terletak di Kecamatan Padangan¹¹⁴.

Tour and travel atau biro perjalanan wisata di Kabupaten Bojonegoro juga cukup banyak yaitu mencapai 18 biro perjalanan wisata. Kemudian, untuk jumlah restoran maupun rumah makan di Kabupaten Bojonegoro mencapai 50 tempat yang kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat bisnis kuliner merupakan bisnis yang dapat terus berkembang. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Bojonegoro perlu dimotivasi dan diberikan kesadaran mengenai berbagai dampak positif dari adanya kegiatan pariwisata, supaya pariwisata di

¹¹⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Bojonegoro Sahabat Dunia*, Pamflet Pariwisata Bojonegoro diambil tanggal 16 Januari 2018

Kabupaten Bojonegoro dapat berkembang dengan baik dan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

4.5.4 Potensi Market Wisatawan

Berdasarkan pada dokumen catatan tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, tingkat kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyaknya wisata baru yang dikembangkan akan semakin menarik minat wisatawan untuk datang dan berwisata di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2015, tiga objek wisata yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark, serta Waduk Pacal memiliki tingkat kunjungan mencapai 56.631 wisatawan¹¹⁵. Kemudian pada tahun 2016, tingkat kunjungan di ketiga objek wisata tersebut masih tetap mengalami kenaikan yaitu mencapai 167.129 kunjungan, pada tahun 2016 tingkat kunjungan wisatawan secara keseluruhan di 15 objek wisata di Kabupaten Bojonegoro mencapai 659.619 kunjungan¹¹⁶.

Untuk tahun 2017, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya pada objek wisata Kayangan Api, Dander Waterpark, dan Waduk Pacal melainkan pada semua objek

¹¹⁵ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2016), *Data Kunjungan Wisata Tahun 2015* diambil tanggal 16 Januari 2018

¹¹⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2016), *Data Kunjungan Wisata Tahun 2016* diambil tanggal 16 Januari 2018

wisata di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pada data kunjungan tahun 2017 terlihat lonjakan tingkat pengunjung yang cukup drastis. Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2017 :

Tabel 4.1 : Tingkat Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

NO	NAMA DAYA TARIK	KUNJUNGAN DAYA TARIK WISATA												2017	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	DANDER WATER PARK	11.766	2.455	4.079	5.964	4.766	5.845	5.776	676	2.082	3.724	1.742	9.072	57.947	
2	KAYANGAN API	10.968	3.020	2.765	4.152	3.789	12.100	8.080	2.870	2.910	4.016	2.443	8.356	65.519	
3	WADUK PACAL	4.745	1.615	1.462	1.932	2.228	4.349	3.822	1.616	1.476	1.718	1.434	3.423	29.870	
4	GOFUN	21.668	8.569	14.025	13.469	10.886	21.691	29.778	10.894	19.347	18.074	14.568	30.734	213.703	
5	NEGERI ATAS ANGIN	11.532	2.924	3.060	3.173	3.332	10.035	1.950	800	1.800	2.700	1.980	9.325	52.611	
6	AGRO WISATA BILIMBING	25.292	8.000	5.640	10.150	9.150	13.300	13.300	5.100	8.900	9.250	7.025	26.605	145.712	
7	EDUKASI GERABAH	897	1.146	2.060	1.624	1.018	3.755	1.200	1.300	1.100	1.400	1.517	2.342	19.359	
8	RUMAH SINGGAH DAN TEKSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270	
9	AGRO GUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.100	
10	AGRO WISATA SALAK WEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923	
11	AGRO WISATA SALAK TANJUNGHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012	
12	AGRO WISATA SUSUR SUNGAI MOJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.552	
13	WISATA EDUKASI MOJODESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387	
14	KEDUNGMAR	756	715	836	947	-	-	-	-	-	-	-	-	3.254	
15	MASYARAKAT SAMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.260	
16	PENANGKARAN RUSA MALO	11	161	144	433	155	189	220	25	400	205	188	234	2.375	
17	GROWGOLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	2.850	3.407	
18	BURIT TONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.075	
19	WISATA KRONDONAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.309	
20	AGRO WISATA JAMBU PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687	
21	SEMAWOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
22	WALI KIDANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.557	
23	WATU GANDUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	JUMLAH													674.948	

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bojonegoro (2018)

Berdasarkan pada data kunjungan wisatawan yang telah diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro berhasil meningkat yaitu sebanyak 674.948 kunjungan dari 23 objek wisata di Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan tingkat kunjungan di tahun 2016 yang telah mencapai 659.619 kunjungan¹¹⁷.

Peningkatan kunjungan wisatawan ini menunjukkan bahwasannya Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi yang cukup besar di sektor pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro maka dapat dikatakan bahwasannya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dapat berjalan secara efektif. Sehingga, dengan adanya kebijakan pariwisata ini telah memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

4.6 Aktor dalam Sektor Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

4.6.1 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik itu eksekutif maupun legislatif memiliki peranan sebagai aktor yang sangat krusial bagi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro,

¹¹⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2018), *Data Kunjungan Wisata Tahun 2017* diambil tanggal 16 Januari 2018

eksekutif berperan sebagai inisiator kebijakan, kemudian DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak legislatif memiliki peran sebagai eksekutor kebijakan.

Pihak eksekutif, selain sebagai inisiator kebijakan juga berperan dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Bojonegoro di berbagai kesempatan dengan memanfaatkan kekuatan dari media massa ataupun media sosial. Keberadaan media massa pastilah memberikan pengaruh besar yang mampu menarik minat masyarakat untuk berwisata ke Bojonegoro. Adanya media sosial juga dimanfaatkan oleh Bupati Bojonegoro, Bapak Suyoto, M.Si untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui akun Instagram miliknya, @kangyotobgoro.

Gambar 4.17 : Promosi Pariwisata Bojonegoro oleh Eksekutif



Sumber : Instagram @kangyotobgoro¹¹⁸

Legislatif atau DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai badan representatif dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang memiliki fungsi anggaran, fungsi

¹¹⁸ Suyoto (2017), Instagram @kangyotobgoro, diakses dari <https://www.instagram.com/p/BYVfbNZhbQj/?hl=id&taken-by=kangyotobgoro> tanggal 21 Januari 2018

legislasi, dan fungsi kontrol. Untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan banyak hal seperti mendorong kebijakan anggaran untuk sektor pariwisata dengan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas di lokasi wisata, promosi destinasi wisata. Kemudian, legislatif juga mendorong terciptanya regulasi mengenai pariwisata di Kabupaten Bojonegoro supaya pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memiliki payung hukum yang jelas. DPRD Kabupaten Bojonegoro selaku pihak legislatif juga terus mendorong adanya promosi yang pasti dan jelas mengenai daya tarik pariwisata di Kabupaten Bojonegoro yang lebih mengutamakan kearifan lokal. DPRD Kabupaten Bojonegoro juga mendorong adanya implementasi dari pariwisata yang telah dipromosikan¹¹⁹.

4.6.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro merupakan dinas yang memiliki tanggungjawab untuk menggali potensi wisata, mengembangkan pariwisata, memelihara objek wisata dan mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dengan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dipertimbangkan. Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Bojonegoro melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri, NGO, akademisi, maupun dengan sektor swasta. Setelah adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui

¹¹⁹ Sigit Kushariyanto (2018), Informan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : 16 Januari 2018 (Lampiran)

program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro semakin giat untuk melaksanakan tugasnya dalam mengurus sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sangat giat dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui berbagai festival dan promosi yang dilakukan. Promosi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti dengan mencetak *booklet*, brosur, memasang reklame mengenai pariwisata di Kabupaten Bojonegoro di lokasi-lokasi strategis, mendirikan Bojonegoro Tourism Information Center, membuat website mengenai pariwisata di Kabupaten Bojonegoro yaitu wisatabojonegoro.com, serta meluncurkan aplikasi bagi pengguna *smartphone* yang bernama BOTIC atau Bojonegoro Tourism Information Center yang memuat mengenai informasi wisata di Kabupaten Bojonegoro

Setiap tahunnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro memiliki acara apresiasi wisata Kabupaten Bojonegoro yang biasanya berhadiah pembangunan fasilitas di sebuah objek wisata seperti pembangunan toilet atau fasilitas yang lain. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk memotivasi dan memacu semangat kompetisi masyarakat Kabupaten Bojonegoro, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata untuk terus mengembangkan objek wisata di Kabupaten Bojonegoro.

4.6.3 Sektor Swasta

Sektor swasta dalam kegiatan pariwisata memiliki peranan yang sangat besar sebagai penyedia jasa pendukung atas kegiatan pariwisata di suatu daerah. Sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro pastilah juga membutuhkan sektor swasta untuk mendukung jalannya kegiatan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Sektor swasta dalam pariwisata di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari usaha kecil seperti para pedagang di objek wisata hingga penyedia oleh-oleh dan *souvenir*, penyedia layanan jasa biro perjalanan, pengelola hingga para investor yang menanamkan modalnya untuk pembangunan objek wisata maupun hotel di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Organisasi yang menaungi sektor swasta yang bergerak di bidang perhotelan dan usaha kuliner Kabupaten Bojonegoro dinaungi oleh PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Selain itu, sektor swasta dalam pariwisata di Kabupaten Bojonegoro juga dapat berperan aktif dalam memberikan usulan mengenai kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, kebijakan pariwisata yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan efektif.

4.6.4 Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara, memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk pada formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Tanpa adanya masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di

sekitar objek wisata, sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro tidak akan mampu berjalan dengan baik. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata akan memanfaatkan objek wisata di sekitarnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi pedagang maupun mengelola parkir.

Selain itu, masyarakat dalam pariwisata di Kabupaten Bojonegoro juga berperan aktif di dalam mengusulkan kebijakan pengembangan pariwisata. Masyarakat dapat memberikan usulannya mengenai pembangunan yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pemerintah supaya objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya mendapatkan perhatian. Masyarakat juga dapat mengusulkan kebijakan anggaran melalui Musrenbang yang sering diadakan di balai desa bersama Perangkat Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, serta dari legislatif. Sehingga, dalam proses formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam formulasi kebijakan pariwisata.

BAB V

PERANAN DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM

FORMULA KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN

BOJONEGORO

5.1 Peranan Aktor dalam Pembuatan Kebijakan

5.1.1 Peranan Legislatif

Sebuah kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Menurut Budi Winarno, dalam mengambil setiap keputusan politik, termasuk kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi para pemegang kekuasaan dalam mengambil keputusan politik tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi-kondisi ekonomi, persyaratan-persyaratan prosedural, komitmen-komitmen yang telah dibuat sebelumnya, tekanan-tekanan sosial dan politik, dan sebagainya. Jika terdapat tekanan-tekanan sosial-politik dalam pengambilan keputusan di dalam kebijakan publik, biasanya keputusan dibuat berdasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan¹²⁰.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sigit Kushariyanto., S.E., M.M, selaku informan kunci dalam penelitian ini, beliau memberikan pernyataan bahwa¹²¹ :

¹²⁰ Budi Winarno, *Op.Cit*

¹²¹ Sigit Kushariyanto (2018), Informan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : 16 Januari 2018

“Peranan DPRD dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 3 hal, yang pertama adalah politik, dimana kebijakan tersebut menguntungkan organisasi politik atau tidak...Organisasi memiliki pokok-pokok pikiran yang kemudian ditampung dari aspirasi masyarakat. Kemudian, DPRD mengambil kebijakan dari aspirasi masyarakat yang kemudian berwujud sebagai kebijakan aktif misalnya seperti kebijakan pembangunan infrastruktur ke lokasi wisata. Kemudian kebijakan aktif tersebut dapat ditunjukkan kepada masyarakat sehingga saya dapat mengklaim kebijakan tersebut bahwa “ini adalah hasil kerja saya” sehingga akan menguntungkan secara politis”

Berdasarkan pada teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Budi Winarno yang telah disebutkan sebelumnya, teori ini sesuai dengan realitas yang terjadi berdasarkan pada pernyataan informan kunci dan apa yang dirasakan oleh peneliti sendiri pada saat melaksanakan penelitian. Teori ini memberikan gambaran yang sama antara hasil penelitian dengan teori yang dikemukakan serta pernyataan dari informan. Kesamaan antara teori dengan realitas yang ditemukan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian adalah dalam formulasi dan pengambil suatu keputusan publik, khususnya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” terdapat faktor-faktor keuntungan politis yang dipertimbangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak legislatif memiliki peranan yang sangat besar dalam proses formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. DPRD Kabupaten Bojonegoro, melalui Komisi B selaku komisi yang membidangi sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memiliki peranan yang sangat vital dalam proses formulasi kebijakan

pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Bapak Sigit Kushariyanto, S.E., M.M selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan pendapat bahwa¹²² :

“Komisi B sangat mendukung adanya kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro mengingat industri pariwisata merupakan industri yang sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan multiplier effect bagi sektor-sektor yang lain, dan multiplier effect tersebut mampu berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro sendiri memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan.”

Berdasarkan pada pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Sigit Kushariyanto tersebut, dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten Bojonegoro memiliki peranan yang sangat besar dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui adanya dukungan terhadap kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Bapak Sigit Kushariyanto selaku Ketua Komisi B yang membidangi sektor pariwisata sangat menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan karena sektor tersebut dapat memberikan *multiplier effect* dan efek tersebut mampu berjalan secara berkelanjutan. Selain itu Komisi B juga menyadari bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro cukup besar sehingga harus dikembangkan dan diatur melalui sebuah kebijakan pariwisata.

DPRD Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung dan mendorong kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui kebijakan anggaran melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas, promosi, dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro. Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro juga mendorong agar segera dibuat regulasi tentang pariwisata di Kabupaten

¹²² *Ibid,*

Bojonegoro supaya pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memiliki payung hukum yang jelas.

DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui komisi B harus berperan secara pro aktif dalam formulasi kebijakan pariwisata sehingga akan mampu menciptakan sinergitas dan kesinambungan bagi sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga jika tercipta sinergitas antara pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola objek wisata, dan masyarakat dan dari sinergitas tersebut akan mampu menciptakan kesinambungan dimana masyarakat dapat merasakan dampak positif, terutama pada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kesejahteraan dan peningkatan perekonomian ini akan dapat dirasakan oleh masyarakat jika mereka mampu mengelola dan memanfaatkan kebijakan pariwisata tersebut dengan baik.

5.1.2 Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

Menurut Palumbo, dalam Budi Prasetyo, setidaknya terdapat empat tahapan dalam perumusan kebijakan publik dimana pada masing-masing tahapan terdapat banyak unsur-unsur politis dan berbagai kepentingan di dalamnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah agenda setting, penentuan masalah (*problem definition*), usulan kebijakan (*policy design*) dan yang terakhir adalah legitimasi kebijakan (*policy legitimation*)¹²³. Pada tahapan kedua dan ketiga, yaitu penentuan masalah (*problem definition*) dan usulan kebijakan (*policy design*), akan dapat melibatkan banyak pihak supaya permasalahan yang terjadi dapat menampung

¹²³ Budi Prasetyo (2009), *Op.Cit.*, Hlm. 50

berbagai kepentingan pihak-pihak tersebut. Salah satu pihak yang banyak keterlibatannya dalam tahapan perumusan masalah atau *problem definition* dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah dinas yang bertugas untuk menangani urusan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro mulai dari menggali potensi pariwisata hingga promosi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Peranan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan pariwisata sangatlah besar. Ibu Dyah Enggarini Mukti, S.E., M.M selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dan selaku informan kunci dalam penelitian ini memberikan pernyataan bahwa¹²⁴ :

“Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Bojonegoro memiliki peranan sebagai fasilitator baik itu secara fisik maupun non-fisik, sebagai regulator, dan memberikan bantuan dan pendampingan dalam pengembangan pariwisata. Untuk menjadi fasilitator baik itu fasilitator fisik maupun non fisik dibutuhkan peranan dari pemerintah karena pemerintah memiliki sumber daya yang sangat kuat yaitu 3D Duit Daya dan Dukungan”

Ibu Dyah Enggarini Mukti juga memberikan pernyataan bahwa¹²⁵ :

“Disbudpar mengumpulkan data terkait pariwisata di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi kebutuhan pengembangan, potensi

¹²⁴ Dyah Enggarini Mukti (2018), Informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : 16 Januari 2018

¹²⁵ *Ibid*,

pariwisata, serta komitmen dari masyarakat mengenai objek wisata di daerahnya. Kemudian tiga hal tersebut dianalisis dan disusun menjadi kebijakan yang diusulkan oleh Disbudpar”

Hal tersebut dapat dikatakan sesuai dengan teori kebijakan publik khususnya pada tahapan kedua yaitu penentuan masalah atau *problem definition* dimana tahapan ini meliputi kegiatan memperkirakan kebutuhan menetapkan area atau wilayah permasalahan dan menentukan kelompok sasaran dalam kebijakan publik yang dirumuskan, tidak semua usulan masalah dari masyarakat mendapatkan perhatian untuk diteruskan dalam proses perumusan kebijakan. Terdapat proses seleksi dan proses penekanan-penekanan tertentu yang dapat tertangkap dalam skala prioritas perhatian pembuat kebijakan. Permasalahan yang diperjuangkan dan dapat menjadi perhatian inilah yang selanjutnya akan diarahkan untuk menjadi agenda kebijakan yang ditetapkan bersama¹²⁶. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi pariwisata, serta komitmen dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Dari kebutuhan, potensi, serta dari komitmen masyarakat tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro melakukan analisis untuk menilai hal-hal apa saja yang pantas untuk diusulkan untuk dijadikan sebuah kebijakan yang dimasukkan ke dalam program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”.

Pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti tersebut, sesuai dengan teori kebijakan publik, khususnya politik dalam kebijakan publik yang

¹²⁶ Budi Prasetyo (2009), *Op.Cit.*, Hlm. 55

dikemukakan oleh Palumbo terutama pada tahapan ketiga dalam proses perumusan kebijakan publik yaitu usulan kebijakan atau *policy design* yang bertujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep, yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Dalam formulasi kebijakan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro berperan aktif sebagai regulator dan pengusul kebijakan pariwisata seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti. Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro pastilah turut menjadi pengusul kebijakan melalui usulan kebijakan yang telah diajukan.

Kemudian, Pihak Eksekutif, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro merupakan pihak yang memberikan ide mengenai kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Eksekutif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sangat menyadari bahwasannya sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bojonegoro sehingga kedua aktor ini berinisiatif untuk merumuskan kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”¹²⁷.

Kesamaan ide yang dimiliki oleh eksekutif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini, memberikan kemudahan pada tahapan *agenda setting* dimana ada kepentingan yang sama yang sedang diperjuangkan

¹²⁷ Dyah Enggarini Mukti., *Loc.Cit*

oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penentuan *agenda setting* bias kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor kebijakan dapat diminimalkan. Kesamaan ide dan tujuan yang dimiliki oleh kedua aktor ini pada akhirnya menimbulkan keselarasan dalam proses formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dimana pada akhirnya banyak sekali usulan kebijakan yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mendapatkan persetujuan dari legislatif maupun eksekutif.

Selain melaksanakan dua peranan yang telah disebutkan sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga memiliki peranan untuk melakukan pengarahannya dan pembinaan secara kelembagaan terhadap kawasan-kawasan yang dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata berdasarkan potensi wisata dan komitmen masyarakat yang tinggal di sekitar potensi wisata tersebut. Potensi wisata dan komitmen dari masyarakat sekitar sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata karena tanpa dua hal tersebut objek wisata tidak akan mampu berkembang meskipun pemerintah telah memberikan dukungan. Kemudian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah atau RIPPDA sebagai panduan dari sisi kebijakan dan strategi bagi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga mengarahkan masyarakat, industri pariwisata (investor), serta pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, para pelaku industri pariwisata

di Kabupaten Bojonegoro akan diberikan bantuan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam mengurus perizinan supaya lebih mudah serta membantu para pelaku industri pariwisata tersebut dalam melakukan promosi sehingga program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan dapat berjalan dengan baik.

5.1.3 Peranan Sektor Swasta

Sektor pariwisata merupakan sebuah sektor yang tidak dapat berjalan sendiri sehingga memerlukan keterlibatan banyak pihak sehingga kegiatan kepariwisataan tersebut dapat berjalan dengan baik. Setidaknya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan antara lain akademisi, *business* (industri kepariwisataan dan sektor perekonomian lainnya), *government* (pemerintah), *community* (masyarakat sekitar objek wisata ataupun NGO), serta media. Kelima unsur atau pihak tersebut haruslah mampu berjalan beriringan dalam mengembangkan sektor pariwisata, pihak-pihak tersebut dikenal sebagai *pentahelic*. Jika salah satu pihak tidak dapat berjalan dengan baik, maka sektor pariwisata juga tidak mampu berjalan dengan baik.

Peranan *business* yang bergerak di industri pariwisata atau yang selanjutnya kita dapat menyebut sebagai sektor swasta sangatlah besar. Sektor swasta dalam industri pariwisata terdiri dari banyak komponen mulai dari pengusaha mikro seperti pengusaha penyewaan kendaraan, pedagang di sekitar objek wisata, pengusaha restoran, pengusaha oleh-oleh dan souvenir, *travel agent*, bahkan hingga pengelola parkir di sebuah objek wisata. Kemudian, sektor

swasta dalam industri pariwisata yang termasuk pada pengusaha makro misalnya para investor hotel yang bisaanya akan menanamkan investasinya untuk pembangunan hotel di kawasan yang dinilai potensial dan akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaannya.

Dalam penelitian ini, sektor swasta juga dilibatkan dalam wawancara sebagai informan pendukung. Informan pendukung yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola dari tiga objek wisata yang diunggulkan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Dander Waterpark, Kayangan Api, serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo. Pengelolaan Dander Waterpark serta Kayangan Api dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dua objek wisata ini mendapatkan kucuran dana dari APBD Kabupaten Bojonegoro namun pengelolaannya tetap melibatkan warga yang tinggal di sekitar objek wisata tersebut. Kemudian, Agrowisata Belimbing Ngringinrejo merupakan objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ngringinrejo dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Dalam perumusan kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata Ke Bojonegoro”, sektor swasta khususnya pengelola objek wisata Dander Waterpark, Kayangan Api, serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo memiliki peranan dalam implementasi kebijakan pariwisata yang diformulasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pengelola ketiga objek wisata tersebut berperan aktif dalam mengelola dan mendukung operasional ketiga objek wisata tersebut sehingga ketiga objek wisata tersebut dalam beroperasi dengan baik.

5.1.4 Peranan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, khususnya warga yang tinggal di sekitar objek wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro juga memiliki beberapa peranan dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Pada umumnya, masyarakat akan mengusulkan mengenai pembangunan infrastruktur atau fasilitas di objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian, masyarakat juga dapat mengusulkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mengenai potensi wisata yang ada supaya potensi wisata tersebut mendapatkan perhatian dan menjadi sasaran kebijakan pemerintah di sektor pariwisata.

Untuk pembahasan anggaran pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata Kabupaten Bojonegoro, legislatif berperan untuk mendorong anggaran yang telah dimusyawarahkan melalui Musrenbang di tingkat desa bersama pengelola objek wisata, warga setempat, serta dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.

Ibu Dyah Eggarini Mukti, menyatakan bahwa¹²⁸ :

“untuk mekanisme anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas, itu dilakukan melalui musrenbang di tingkat desa bersama dinas terkait, seperti dengan Disbudpar, dengan Pekerjaan Umum, juga dengan legislatif”

Kemudian, Bapak Supriyo sebagai pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dan juga sebagai Warga Desa Ngringinrejo turut mengatakan bahwa

¹²⁸ Dyah Enggarini Mukti (2018), Informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : 7 Maret 2018

masyarakat yang tinggal di sekitar Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dapat menyampaikan pendapatnya terkait pembangunan infrastruktur, fasilitas, maupun kebijakan anggaran melalui Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Desa bersama dinas-dinas terkait. Beliau mengatakan bahwa¹²⁹ :

“kita sebagai masyarakat juga duduk bersama pemerintah desa, DPRD untuk membahas mengenai anggaran untuk wisata ini. Bagaimana kedepannya, masyarakat biasanya memberikan usulannya melalui itu”

Berdasarkan pada kedua pernyataan yang diberikan oleh informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peranan dan keterlibatan dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Pada umumnya, masyarakat menyampaikan usulannya terkait pengembangan objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggal mereka karena mereka juga memiliki kepentingan akan pengembangan objek wisata tersebut. Selain itu, kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro merupakan kebijakan yang sifatnya *bottom-up*.

Hal ini sesuai dengan *agenda setting*, dimana masyarakat sekitar objek wisata memperjuangkan usulan dan kepentingannya untuk dijadikan sebagai agenda kebijakan karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut juga mereka berhasil memperjuangkan kepentingannya. Melalui usulan yang diberikan oleh masyarakat pada saat Musrenbang, pemerintah akan mampu untuk menganalisis dan mempertimbangkan urgensi atas usulan kebijakan tersebut. Melalui usulan yang diberikan oleh masyarakat, *agenda setting* akan dapat ditetapkan dengan baik mengingat ada kepentingan masyarakat yang terkandung didalamnya. Sehingga, untuk kedepannya legitimasi atas kebijakan

¹²⁹ Supriyo (2018), Informan Pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, Bojonegoro : 15 Januari 2018

tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwasannya kebijakan tersebut juga merupakan usulan dari masyarakat.

Para warga yang tinggal di sekitar lokasi objek wisata juga memiliki peranan dalam mendukung program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dengan cara memberikan fasilitas parkir yang dikelola oleh warga sekitar objek wisata. Kemudian para warga yang tinggal di sekitar ketiga objek wisata yang diteliti juga berwirausaha sebagai pedagang yang membuka warung yang berjualan di sekitar objek wisata sehingga dari usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa maupun perekonomian masyarakat itu sendiri.

Gambar 5.1 Pedagang di objek wisata Dander Waterpark



Sumber : Dokumen pribadi (2018)

Misalnya di objek wisata Dander Waterpark warga sekitar membuka toko yang berjualan makanan ringan dan minuman, hingga usaha persewaan pelampung. Kemudian, warga di sekitar Kayangan Api juga membuka usaha warung yang menjual makanan dan minuman ringan serta beberapa souvenir. Kemudian, di Agrowisata Belimbing Ngringinrejo sebagian besar warga sekitar

berjualan buah belimbing hasil kebun milik mereka. Hal ini pula dapat berimbas pada tingkat kunjungan karena dengan adanya para pedagang ini pastilah memberikan kenyamanan bagi para pengunjung untuk membeli oleh-oleh atau hanya sekedar untuk membeli makanan dan minuman di objek wisata. Jika tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata maka dapat diperkirakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan sangat berpotensi untuk menurun karena kurangnya kenyamanan di objek wisata.

5.2 Kepentingan Aktor dalam Pembuatan Kebijakan

5.2.1 Kepentingan Legislatif

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD mewajibkan mereka untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan, baik itu Peraturan Daerah, termasuk merumuskan sebuah kebijakan publik. DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga legislatif yang berperan aktif dalam merumuskan sebuah kebijakan publik pastilah telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum sebuah kebijakan publik ditetapkan. Pihak legislatif akan menilai isu apa saja yang pantas untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik.

Seperti yang telah diketahui, proses perumusan kebijakan publik pastilah mengandung banyak sekali unsur-unsur politis dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Dengan banyaknya kepentingan tersebut, DPRD selaku aktor kebijakan publik pastilah menimbangkan unsur-unsur politis dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh organisasi masing-masing dari anggota DPRD. Sehingga pada

akhirnya kebijakan publik yang dirumuskan akan dapat memuat berbagai kepentingan yang mampu memuat berbagai kepentingan tersebut sehingga dapat menguntungkan organisasi.

Hal ini sesuai dengan teori kebijakan publik, terutama pada tahapan pertama yaitu tahapan *agenda setting* yang merupakan tahapan untuk menganalisis dan menetapkan sifat dan besaran serta distribusi masalah yang dipecahkan dalam kebijakan yang dirumuskan. Menemukan dan merumuskan masalah yang tepat merupakan bagian yang sangat penting dalam perumusan kebijakan publik. Ada kalanya kebijakan menjadi bias kepentingan individu atau kelompok juga disebabkan proses penentuan dan pendefinisian masalah sarat dengan perjuangan kepentingan kelompok tertentu untuk mementingkan penyelesaian atas masalahnya dengan mengesampingkan masalah lain yang dianggap tidak penting. Sebuah masalah merupakan masalah publik atau privat sangat tergantung dari *political will* rezim yang sedang berkuasa. *Political will* ini mampu untuk menggiring perhatian dan skala prioritas terhadap upaya-upaya pendefinisian dan pemecahan masalah yang termasuk dalam ranah publik¹³⁰.

Teori tersebut senada dengan pernyataan Bapak Sigit Kushariyanto selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membidangi sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Beliau menyatakan bahwa¹³¹ :

“Namun secara umum kepentingan dari perumusan kebijakan pariwisata adalah untuk mensejahterakan masyarakat sehingga

¹³⁰ Miriam Budiarjo(2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. Rev*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 315

¹³¹ Sigit Kushariyanto, *Loc.Cit*

masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat, ada pihak-pihak lain seperti PHRI, NGO dan lain-lain yang memiliki kepentingan pribadi, yaitu untuk mensejahterakan organisasi ataupun diri mereka sendiri”

Dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastilah juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat mengingat DPRD Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah lembaga perwakilan masyarakat yang juga memiliki fungsi untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat tersebut menjadi sebuah kebijakan publik. Bapak Sigit Kushariyanto selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro juga menyatakan bahwa¹³² :

“Dalam formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 3 hal, yang pertama adalah politik, dimana kebijakan tersebut menguntungkan organisasi politik atau tidak...Organisasi memiliki pokok-pokok pikiran yang kemudian ditampung dari aspirasi masyarakat. Kemudian, DPRD mengambil kebijakan dari aspirasi masyarakat yang kemudian berwujud sebagai kebijakan aktif misalnya seperti kebijakan pembangunan infrastruktur ke lokasi wisata. Kemudian kebijakan aktif tersebut dapat ditunjukkan kepada masyarakat sehingga saya dapat mengklaim kebijakan tersebut bahwa “ini adalah hasil kerja saya” sehingga akan menguntungkan secara politis karena masyarakat akan mengetahui baju yang saya pakai (partai politik)”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Sigit Kushariyanto tersebut sangat sesuai dengan teori kebijakan publik khususnya pada tahapan pertama yaitu tahapan agenda setting. DPRD sebagai suatu badan legislatif memiliki banyak

¹³² *Ibid,*

anggota dengan berbagai latar belakang politik yang berbeda-beda dan tentu saja kepentingan yang berbeda. Sehingga dalam memformulasikan dan merumuskan sebuah kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastilah mempertimbangkan keuntungan organisasi.

Penentuan *agenda setting* oleh aktor kebijakan publik, dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro khususnya Komisi B pastilah mempertimbangkan pada hal tersebut ketika memformulasikan kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Sigit Kushariyanto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kebijakan publik khususnya pada tahapan pertama yaitu tahapan *agenda setting* sesuai dengan realitas yang terjadi pada formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”.

5.2.2 Kepentingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dimuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum, fungsi dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi¹³³ :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pariwisata;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro seperti yang telah dikemukakan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sebagai aktor dalam formulasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastilah juga memiliki berbagai kepentingan. Namun kepentingan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sangat berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh aktor legislatif. Ibu Dyah Enggarini Mukti selaku Kepala Bidang

¹³³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2014), *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://dinbudpar.bojonegorokab.go.id/index.php/menu/detail/11/Tupoksi> tanggal 18 Januari 2018

Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa¹³⁴ :

“Kepentingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam kebijakan pariwisata adalah untuk pengembangan RPJMD yaitu untuk kepentingan meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan”

Berdasarkan pada teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn khususnya pada tahapan yang kedua, yaitu formulasi kebijakan. Kraft dan Furlong, dalam Muchlis Hamdi menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut¹³⁵.

Dalam hal ini, sesuai dengan teori yang telah dikemukakan serta pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti maka dapat ditemukan kesesuaian antara teori dengan realitas yang terjadi. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah memiliki kepentingan untuk mengembangkan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2018 melalui sektor pariwisata. Sehingga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kepentingan dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yaitu untuk menaikkan atau meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro serta menaikkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bojonegoro.

¹³⁴ Dyah Enggarini Mukti, *Loc. Cit*

¹³⁵ Muchlis Hamdi, *Loc. Cit*

Jika lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bojonegoro meningkat maka jumlah okupansi hotel di Kabupaten Bojonegoro akan meningkat, serta layanan dari penyedia jasa wisata di Kabupaten Bojonegoro akan lebih dibutuhkan dan pastinya akan menguntungkan industri pariwisata itu sendiri serta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Jika kedua kepentingan tersebut dapat dipenuhi melalui kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” maka akan menghasilkan berbagai dampak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro terutama pada dampak ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dapat berkembang dengan baik jika kepentingan tersebut dapat terpenuhi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro memperjuangkan kepentingan tersebut di dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi berbagai sektor yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

5.2.3 Kepentingan Sektor Swasta

Keberadaan sektor swasta dalam industri pariwisata sangatlah penting mengingat pihak ini adalah pihak yang mampu memberikan pelayanan dan jasa kepada para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata. Sektor swasta dalam industri pariwisata pada umumnya terdiri dari para investor makro seperti investor hotel, investor untuk mengembangkan suatu objek wisata, maupun sektor swasta yang bersifat mikro seperti para pedagang souvenir, pengusaha restoran, pengusaha *travel agent*, dan lain-lain. Sektor swasta sebagai salah satu pilar dalam

good governance, juga dapat memberikan usulan serta menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebijakan pariwisata.

Terkait dengan kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ini, selain memiliki peranan dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro, sektor swasta juga memiliki kepentingan atas kebijakan pariwisata yang diformulasikan. Sektor swasta sebagai sektor yang juga bergerak di sektor perekonomian pastilah juga memiliki kepentingan atas kebijakan tersebut supaya kegiatan mereka dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan profit atau keuntungan bagi perusahaan ataupun diri mereka sendiri.

Bapak Sigit Kushariyanto menyatakan bahwa¹³⁶ :

“pengusaha, penyedia jasa, asosiasi-asosiasi yang memiliki kepedulian terhadap pariwisata mereka memiliki harapan dengan keterlibatannya dalam kegiatan industri pariwisata di Kabupaten Bojonegoro secara otomatis harapannya adalah menesejahterakan dirinya sendiri, ada penghasilan yang berdampak untuk mereka”

Selain itu, kepentingan sektor swasta dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk kemudahan mereka dalam berinvestasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya kebijakan pariwisata yang memberikan kemudahan investasi bagi sektor swasta, maka mereka akan dengan mudah menanamkan modalnya dan mendapatkan keuntungan dari sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Kepentingan ini juga didukung oleh legislatif dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

¹³⁶ Sigit Kushariyanto, *Loc.Cit*

melalui kebijakan yang diformulasikan seperti yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya.

Kesamaan kepentingan dari sektor swasta, serta kemudahan yang ingin diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui pihak legislatif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro bagi sektor swasta untuk berinvestasi, sesuai dengan tahapan *agenda setting*. Sehingga, agenda kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mampu memberikan keuntungan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta yang juga memiliki kepentingan masing-masing dalam kebijakan pariwisata pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”.

5.2.4 Kepentingan Masyarakat

Masyarakat sebagai warga negara yang juga merupakan aktor kebijakan, selain memiliki peranan dalam formulasi kebijakan, mereka pastilah juga memiliki kepentingan dan aspirasi masing-masing yang patut diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Kepentingan masyarakat, didalam sebuah formulasi kebijakan pada umumnya terkait dengan hajat hidup mereka. Begitu pula dengan kebijakan pariwisata pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dimana masyarakat juga memiliki peranan dalam formulasi kebijakan tersebut. Dengan adanya peranan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemberi usulan kebijakan,

masyarakat pastilah juga memiliki beberapa kepentingan atas usulan dan aspirasi yang mereka sampaikan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, pada umumnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu objek wisata yang ada di sekitar mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah dan menjadi sasaran kebijakan. Jika kepentingan tersebut berhasil dijadikan sebagai agenda kebijakan oleh pemerintah, maka kepentingan masyarakat tersebut akan tercapai dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sendiri. Jika objek wisata yang ada di sekitarnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut mengingat masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata banyak yang bermatapencaharian sebagai pedagang atau pengelola parkir di objek wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Jika tingkat kunjungan wisatawan meningkat karena adanya kebijakan pariwisata, maka yang akan mendapatkan keuntungan pertama kali adalah masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata dengan naiknya jumlah penghasilan yang mereka dapatkan dari para wisatawan. Kemudian, masyarakat juga berkepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya dalam pembangunan akses jalan menuju objek wisata masyarakat juga berkepentingan atas pembangunan infrastruktur tersebut untuk kemudahan akses mereka.

5.3 Analisis *Policy Network*

Interaksi aktor dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dari interaksi yang dilakukan oleh para aktor tersebut sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan baru. Kickert dkk, dalam *Managing Complex Networks : Strategies for Public Sectors* menegaskan bahwa dalam *public policy making* dan *governance* perlu dibangun kerangka jaringan (*network*) antar berbagai aktor meliputi individu, koalisi, biro, ataupun organisasi. Kerangka jaringan ini kemudian dikenal sebagai *Policy Network*¹³⁷.

Policy network ini, dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola hubungan saling ketergantungan diantara para aktor yang terlibat didalam suatu formulasi kebijakan publik. Ketergantungan yang terjadi diantara para aktor yang terlibat didalam formulasi suatu kebijakan disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari masing-masing aktor untuk mencapai atau memenuhi tujuan atau kepentingannya. Sehingga, aktor tersebut memerlukan aktor lain yang memiliki sumberdaya yang dapat membantu untuk memenuhi tujuan dan kepentingannya. Sehingga dari hal tersebut akan menghasilkan interaksi aktor dalam formulasi kebijakan untuk saling membantu supaya tujuan atau kepentingan dari masing-masing aktor dapat tercapai atau terpenuhi.

Menurut Pierre dan Peters, dalam Pratikno, adanya interaksi yang terjadi diantara aktor kebijakan ini pastilah menimbulkan suatu konsekuensi. Dengan

¹³⁷ Kickert, *et.al* (1999), *Managing Complex Networks : Strategies for Public Sectors*, London :SAGE Publications

adanya interaksi aktor dalam perumusan kebijakan publik ini, maka kebijakan publik menjadi lebih ditentukan oleh keinginan aktor yang terkait melalui proses negosiasi. Relasi pemerintah dengan aktor yang lain pun menjadi lebih setara dan pemerintah tidak dapat lagi dengan mudah memaksakan kepentingannya¹³⁸.

Begitu pula dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dimana ada berbagai aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata yang diformulasikan. Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” antara lain eksekutif, legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, sektor swasta seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Bojonegoro dan pelaku industri wisata di Kabupaten Bojonegoro, serta berbagai NGO di Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti peranan dan kepentingan legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, sektor swasta yaitu pengelola objek wisata Dander Waterpark, Kayangan Api, serta Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, serta masyarakat.

Adanya keterlibatan beberapa aktor dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastilah membutuhkan interaksi diantara aktor-aktor tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah jaringan kebijakan atau *policy network*. Pola hubungan ketergantungan antara para aktor yang memformulasikan kebijakan pariwisata

¹³⁸ Pratikno (2007), Governance dan Krisis Teori Organisasi, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 11 Nomor 2, Hlm. 135

Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena adanya ketidakmampuan aktor untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya sehingga membutuhkan aktor lain untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Ketidakmampuan aktor kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, juga diakui oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti yang menyatakan bahwa¹³⁹ :

“dibutuhkan peranan dari pemerintah karena pemerintah memiliki sumber daya yang sangat kuat yaitu 3D Duit Daya dan Dukungan ... dalam industri pariwisata ASPI yang terdiri dari pengusaha di bidang pariwisata akan ditarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Bojonegoro dan perizinan atas industri tersebut akan dibantu dan dimudahkan oleh Disbudpar”

Beliau juga menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga membutuhkan aktor lain dalam memformulasikan kebijakan pariwisata, yaitu dari sektor swasta yang mampu mendukung operasional objek wisata di Kabupaten Bojonegoro sehingga formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dapat berjalan dengan baik. Keberadaan sektor swasta sangatlah vital bagi jalannya kegiatan kepariwisataan mengingat sektor swasta merupakan penyedia jasa yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para wisatawan. Dengan adanya investasi untuk pembangunan hotel maupun objek wisata baru maka akan mendorong tumbuhnya kunjungan wisatawan di sebuah daerah yang pastinya

¹³⁹ Dyah Enggarini Mukti, *Loc.Cit*

juga akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga sangat membutuhkan sektor swasta untuk mengetahui kepentingan dan rencana-rencana strategis dari sektor swasta guna mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan sektor swasta merupakan hal yang sangat vital mengingat mereka mampu mengidentifikasi potensi wisata disuatu daerah serta mereka mampu mendukung adanya pariwisata tersebut. Melalui keberadaan sektor swasta seperti pengelola, para *stakeholders* maupun aktor kebijakan dapat mengetahui secara langsung bagaimana operasional sebuah objek wisata dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing objek wisata. Sehingga para aktor kebijakan dapat mengidentifikasi dan menentukan permasalahan apa saja yang sekiranya pantas untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik.

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Supriyo selaku pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dan informan pendukung dalam penelitian ini. Beliau menyatakan bahwa¹⁴⁰ :

“Adanya kebijakan pariwisata dan program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar agrowisata belimbing. Setelah adanya kebijakan jumlah kunjungan sangat berbeda dan secara otomatis perekonomian untuk pekebun dan masyarakat juga meningkat”

¹⁴⁰ Supriyo (2018), Informan Pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, Bojonegoro : 15 Januari 2018

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa teori *policy network* terbukti sesuai dengan realitas dimana sektor swasta membutuhkan bantuan dari aktor lain yaitu pemerintah untuk memenuhi kepentingannya. Sebagai aktor dari sektor swasta, pihak pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo pastilah menginginkan adanya peningkatan pengunjung dari tahun ke tahun. Sehingga, mereka membutuhkan formulasi kebijakan pariwisata dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kunjungan wisata. Begitupula dengan dua objek wisata lain yang diteliti, yaitu Dander Waterpark dan Kayangan Api. Pengelola kedua objek pariwisata tersebut juga membutuhkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk pengelolaan masing-masing objek wisata melalui kebijakan pariwisata ataupun peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah.

Kemudian, masyarakat yang juga memiliki peranan dan kepentingan di dalam formulasi kebijakan pariwisata pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” juga membutuhkan aktor lain yaitu legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, serta sektor swasta untuk memenuhi kepentingannya. Masyarakat membutuhkan legislatif dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan usulan kebijakan dan aspirasinya terkait permasalahan pariwisata yang ada di sekitar mereka. Masyarakat juga memerlukan bantuan dari sektor swasta supaya kegiatan pariwisata di daerahnya dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang

membutuhkan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta memperoleh usulan kebijakan dan aspirasi masyarakat untuk diagendakan menjadi sebuah kebijakan publik.

5.4 Dampak Sektor Pariwisata bagi Kabupaten Bojonegoro

Sektor pariwisata merupakan sektor yang akan mendatangkan banyak sekali keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena sektor pariwisata pastilah akan menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang kemudian akan menghasilkan relasi dengan kesejahteraan masyarakat. Wisatawan yang sedang berwisata, pastilah akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi akomodasinya selama melakukan perjalanan wisata, baik biaya untuk tempat penginapan, biaya transportasi, membeli cinderamata, dan keperluan-keperluan lain. Hal-hal tersebut pastilah berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat di daerah wisata tersebut.

Menurut Leiper, dalam Pitana, setidaknya terdapat beberapa dampak ekonomi pariwisata, antara lain¹⁴¹ :

a. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata seperti hotel, restoran, penyedia jasa transportasi, agen perjalanan, pemandu wisata, penjual souvenir, maupun pengelola objek wisata.

¹⁴¹ I Gde Pitana (2009), *et.al, Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI, Hlm. 186-188

b. Pendapatan pemerintah

Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sektor pariwisata pada umumnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wisatawan yang bisaanya dikenakan pada pajak hotel dan restoran.

c. Penyerapan tenaga kerja

Sektor pariwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari sektor lain. Banyaknya sektor yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata itu sendiri, membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang kemudian menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja sehingga banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata, misalnya karyawan hotel, karyawan restoran, maupun usaha-usaha mikro di bidang pariwisata.

d. *Multiplier effects*

Terdapat beragam efek *multiplier* yang dapat dihitung dari kegiatan pariwisata, yaitu *expenditure*, *employment*, *income*, dan sebagainya.

Pendapat Leiper yang kemudian dikutip oleh Pitana tersebut, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh para informan dalam penelitian ini, baik itu informan kunci maupun informan pendukung. Bapak Sigit Kushariyanto

selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membidangi urusan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa¹⁴² :

“Adanya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” secara otomatis memberikan berbagai dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun masyarakat Kabupaten Bojonegoro itu sendiri. Karena dari kegiatan pariwisata tersebut akan menimbulkan dampak ekonomi”

Kemudian, Ibu Dyah Enggarini Mukti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga menyatakan bahwa¹⁴³ :

“Adanya kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastitlah memberikan dampak positif. Terdapat dua poin dalam mengukur dampak positif dari kegiatan pariwisata, yang pertama adalah kenaikan kunjungan dan yang kedua adalah kenaikan okupansi atau lama tinggal. Sejak adanya kebijakan pembangunan pariwisata dan promosi pariwisata yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini sehingga dari hal tersebut menimbulkan multiplier effect”

Para informan pendukung dalam penelitian ini juga memberikan pernyataan yang serupa dengan pernyataan yang diberikan oleh para informan kunci. Bapak Supriyo selaku pengelola Agro Wisata Belimbing Ngringinrejo menyatakan bahwa¹⁴⁴ :

“Sejak tahun 2015, wisata sangat berbeda dengan saat ini terutama untuk ekonomi pekebun karena selain menjual hasil

¹⁴² Sigit Kushariyanto, *Op.Cit*

¹⁴³ Dyah Enggarini Mukti, *Op.Cit*

¹⁴⁴ Supriyo, *Op.Cit*

kebunnya mereka juga berjualan kopi dan minuman lain ... Program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” termasuk bagus untuk menyemangatkan masyarakat untuk melakukan wisata ke Bojonegoro. Masyarakat sekitar agro juga menilai program wisata berdampak positif bagi masyarakat sekitar agrowisata”

Bapak Rudianto selaku pengelola Dander Waterpark juga menyatakan hal yang senada dengan informan pendukung yang lain. Beliau mengatakan bahwa¹⁴⁵ :

“Adanya perbaikan dan penambahan fasilitas kolam pada tahun 2015 telah berhasil menarik pengunjung dan menaikkan tingkat kunjungan, hingga pada saat launching di bulan Januari 2016 pendapatan Dander Waterpark mencapai kurang lebih 1 Milyar Rupiah”

Pengelola wisata Kayangan Api, Bapak Sarji juga mengatakan hal serupa dengan dua informan pendukung yang telah diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa¹⁴⁶ :

“Sejak adanya penambahan bangunan dan fasilitas, serta perbaikan jalan pada tahun 2015, kunjungan wisatawan ke Kayangan api meningkat karena adanya peningkatan kenyamanan. Tingkat kunjungan wisatawan ke Kayangan Api meningkat sebesar 30%-35% dari tahun 2016 hingga tahun 2017”

Berdasarkan pada pernyataan yang dikemukakan oleh para informan, baik itu informan kunci maupun informan pendukung dalam penelitian ini, dapat ditemukan kesesuaian antara pernyataan satu sumber dengan sumber yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa para informan yang diwawancarai dalam

¹⁴⁵ Rudianto (2018), Informan Pengelola Dander Waterpark, Bojonegoro : 17 Januari 2018

¹⁴⁶ Sarji (2018), Informan Pengelola Kayangan Api, Bojonegoro : 17 Januari 2018

penelitian ini menyatakan sejak adanya kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” yang dimulai pada tahun 2015 telah memberikan berbagai dampak yang bersifat positif karena adanya *multiplier effect* dari sektor pariwisata, terutama dalam perekonomian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro maupun bagi PAD Kabupaten Bojonegoro sendiri.

Sejak adanya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” PAD Kabupaten Bojonegoro dari sektor pariwisata mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, ketika kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” baru dibuat dan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata baru dimulai, PAD Kabupaten Bojonegoro dari sektor pariwisata hanya sebesar 378 juta Rupiah¹⁴⁷. Namun ketika kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” telah berjalan selama 1 tahun, PAD Kabupaten Bojonegoro meningkat drastis. Berdasarkan pada dokumen Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, PAD Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam menjadi sebesar 1.301.487.500 Rupiah dari tiga objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yaitu Kayangan

¹⁴⁷ Tempo.co (2017), *Sektor Pariwisata Sumbang PAD Bojonegoro Hingga 305 Persen*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/834898/sektor-pariwisata-sumbang-pad-bojonegoro-hingga-305-persen> tanggal 19 Januari 2018

Api, Dander Waterpark dan Waduk Pacal¹⁴⁸. Kemudian pada tahun 2017, berdasarkan pada dokumen Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro mampu menyumbang PAD sekitar Rp. 1.117.643.500 per tanggal 29 Desember 2017 dari tiga objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro yaitu Kayangan Api, Dander Waterpark dan Waduk Pacal. Perolehan PAD dari sektor pariwisata ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 896.000¹⁴⁹.

Para informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini, baik itu informan kunci maupun informan tambahan juga memiliki pernyataan lain yang selaras antara satu informan dengan informan lainnya yaitu mengenai keselarasan tujuan dan keinginan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, maupun pengelola objek wisata telah memiliki keinginan yang sama untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dapat tumbuh dengan baik. Ibu Ibu Dyah

¹⁴⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2017), *Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015*, Hlm. 51 data diambil pada tanggal 16 Januari 2018

¹⁴⁹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2018), *Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017*, data diambil pada tanggal 16 Januari 2018

Enggarini Mukti., S.E., MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Budaya menyatakan bahwa¹⁵⁰ :

“Sekarang ini DPRD, Eksekutif dan Disbudpar sudah selaras karena legislatif juga melihat bahwa pariwisata di Kabupaten Bojonegoro tumbuh dengan baik sehingga dukungan yang berupa 3D atau duit, daya, dukungan, yang dimiliki oleh pemerintah datang”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Rudianto selaku pengelola Dander Waterpark. Beliau mengatakan¹⁵¹ :

“tujuan dari pengelola, Disbudpar, dan Pemerintah sudah selaras dalam pengembangan pariwisata”

Berdasarkan pada dua pernyataan yang dikemukakan oleh para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tujuan dari para *stakeholders* di sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro sudah menemui keselarasan. Hal ini pada akhirnya juga akan menimbulkan kemudahan bagi para aktor kebijakan dalam memformulasikan kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Kemudian ketika keinginan dan tujuan yang dimiliki oleh DPRD, Disbudpar, maupun pengelola sudah selaras maka jalannya pariwisata di Kabupaten Bojonegoro akan dapat berjalan dengan lebih baik.

¹⁵⁰ Dyah Enggarini Mukti, *Loc.Cit*

¹⁵¹ Rudianto, *Loc.Cit*

5.5 Hambatan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

Setiap kebijakan publik yang telah dimuskan oleh pemerintah, pastilah akan menemukan hambatan pada saat tahapan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” pastilah juga memiliki hambatan-hambatan yang harus segera diatasi supaya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” dapat berjalan dengan baik seperti sebagaimana mestinya supaya masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat memanfaatkan adanya kebijakan pariwisata tersebut.

Setelah melakukan penelitian di lapangan berupa wawancara dengan berbagai informan baik itu informan kunci maupun informan pendukung, serta hasil observasi penulis di lokasi penelitian selama penulis melaksanakan penelitian terdapat beberapa hambatan bagi jalannya kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Hambatan yang dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro adalah dari Sumber Daya Manusia, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek-objek wisata itu sendiri. Padahal, peranan masyarakat yang tinggal disekitar objek wisata merupakan hal yang sangat vital mengingat mereka akan merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pariwisata di sekitar tempat tinggalnya.

Ibu Dyah Enggarini Mukti mengatakan bahwa¹⁵² :

“Komitmen masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata ... Kesiapan SDM dalam pengembangan pariwisata harus sangat matang untuk mengubah mindset mereka mengenai wisata. Wisata di Bojonegoro tidak bisa berkembang karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Rudianto selaku pengelola Dander Waterpark. Permasalahan yang terjadi di Dander Waterpark juga berasal dari warga sekitar objek wisata. Beliau menyatakan bahwa¹⁵³ :

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup serius dalam mengelola pariwisata namun dalam pengelolaan masih kekurangan SDM. Diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan Dander Waterpark karena mereka masih kurang kesadaran. Masyarakat sekitar Dander Waterpark pada umumnya tidak mau membayar tiket masuk karena mereka merasa bahwa ini adalah daerah (tempat tinggal) mereka”

Bapak Sarji, Pengelola wisata Kayangan Api juga mengatakan hal serupa dengan dua informan yang telah diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa¹⁵⁴ :

“Hambatan pengelolaan di Kayangan Api ada di SDM karena pengelola Kayangan Api hanya ada 7 orang yang bekerja 24 jam tanpa hari libur karena Kayangan Api buka terus, tidak pernah tutup. Kemudian dari masyarakat sekitar juga tidak mau membayar tiket masuk karena mereka merasa Kayangan Api daerahnya sendiri. Bahkan disini lebih besar dari Dander Waterpark, sekitar 40% pengunjung adalah warga sekitar yang tidak mau membayar tiket masuk”

¹⁵² Dyah Enggarini Mukti, *Loc.Cit*

¹⁵³ Rudianto, *Loc.Cit*

¹⁵⁴ Sarji, *Loc.Cit*

Berdasarkan pada ketiga pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa hambatan terbesar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro berasal dari Sumber Daya Manusia, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari masyarakat sekitar serta kesiapan bagi masyarakat untuk turut mendukung kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Selain komitmen dan kesiapan masyarakat, kebijakan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat sekitar untuk turut menjaga dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan seperti tetap membayar tiket masuk meskipun mereka merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.

Kemudian, selain hambatan dari Sumber Daya Manusia atau SDM yang dirasa masih kurang, hambatan lain dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro adalah kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, Kabupaten Bojonegoro merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Sehingga, pada saat musim penghujan tiba, maka beberapa wilayah kecamatan yang berada di wilayah DAS Bengawan Solo akan mengalami bencana banjir. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro sebenarnya juga minim sumber daya pariwisata mengingat kondisi geografisnya yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga tidak memiliki pantai atau gunung yang pada umumnya dijadikan sebagai potensi wisata yang menjanjikan bagi suatu daerah. Hal ini juga diakui oleh Ibu Dyah Enggarini Mukti, beliau mengatakan bahwa :

“kesulitan Bojonegoro dalam mengembangkan pariwisata itu banyak karena kita tidak memiliki laut dan gunung. Secara strategis, Bojonegoro juga bukan merupakan wilayah yang menjadi akses utama karena kita berada di tengah-tengah tidak seperti Tuban dan Lamongan yang merupakan akses utama dan memiliki laut atau Nganjuk yang memiliki gunung”

Keterbatasan dan hambatan geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan sektor pariwisata, kemudian dijadikan sebagai tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro untuk terus berinovasi dan menciptakan objek-objek wisata baru yang sekiranya dapat dijadikan sebagai *icon* wisata Kabupaten Bojonegoro yang kemudian diharapkan mampu memancing tumbuhnya objek-objek wisata baru di Kabupaten Bojonegoro.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB IV serta analisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan, yaitu Teori Kebijakan Publik dan Teori *Policy Network* pada BAB V, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Formulasi kebijakan pariwisata Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” melibatkan beberapa aktor, antara lain legislatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, sektor swasta, serta masyarakat.
- b. Masing-masing aktor memiliki peranan dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Legislatif memiliki peranan sebagai pendorong terciptanya kebijakan pariwisata serta pihak yang menampung aspirasi masyarakat yang dapat ditungkan menjadi sebuah rumusan kebijakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro memiliki peranan sebagai regulator, inisiator kebijakan, serta pengusul kebijakan pariwisata. Sektor swasta memiliki peranan sebagai pengusul kebijakan serta pengelola industri pariwisata yang mendukung kegiatan pariwisata di

Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, masyarakat juga memiliki peranan sebagai pengusul dalam kebijakan pariwisata.

- c. Para aktor memiliki kepentingan masing-masing di dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro”. Legislatif memiliki kepentingan atas kebijakan yang pariwisata diambil supaya kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan secara politik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, berkepentingan untuk menaikkan tingkat kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, sektor swasta memiliki kepentingan untuk mendapatkan profit atau keuntungan atas usaha mereka serta kemudahan akses untuk berinvestasi di Kabupaten Bojonegoro. Terakhir, masyarakat juga memiliki kepentingan terkait perekonomian masyarakat itu sendiri serta kemudahan akses yang bisa mereka dapatkan dari kebijakan pariwisata tersebut.
- d. Hasil atas peranan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” tersebut adalah terciptanya kebijakan pariwisata yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas, kemudahan investasi, serta kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

6.2 Rekomendasi

- a. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peranan masing-masing aktor dalam setiap formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro yang akan datang sehingga kebijakan pariwisata yang dirumuskan dimasa mendatang akan dapat diimplementasikan dengan lebih tepat.
- b. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, dalam memformulasikan kebijakan pariwisata hendaknya juga memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata dalam mengelola objek wisata di sekitarnya.
- c. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, harus terus memacu semangat dan motivasi masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata untuk mengembangkan, mempromosikan, dan memelihara objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Kickert, Walter J.M, Klijin, E.H., Koppenjan, Joop F.M. 1999. *Managing Complex Networks : Strategies for Public Sectors*. London : SAGE Publications
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian : Konsep-konsep Kunci*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Sadana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Research A Methods Sourcebook Edition 3*. SAGE Publications
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pitana, I Gde, Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Prasetyo, Budi. 2008. *Politik Kebijakan Proses Politik dalam Arena Kebijakan*. Surabaya : Luftansah Mediatama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

Zendrato, Samudra Kurniawan. 2014. *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media

JURNAL

Darto, M. 2014. Memimpin Perubahan, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 10 No. 1

Pratikno. 2007. Governance dan Krisis Teori Organisasi\ *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2

Soedarso, Muhammad, Nurif, Windiani. 2014. Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam dengan Pendekatan Maketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No.2

WEBSITE

Agustang. 2016. *Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, Diunduh dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3815/1/agustan.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2017

Anonymous. 2016. *Data Kunjungan Wisatawan ke Bojonegoro 2016*, diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/data-kunjungan-wisatawan-ke-bojonegoro-2016/> tanggal 22 November 2017

Astanti, Vera. 2016. *Bojonegoro Menduduki Peringkat 8 Termiskin Se Jawa Timur*. diakses dari <https://beritabojonegoro.com/read/9028-bojonegoro-menduduki-peringkat-8-termiskin-se-jawa-timur.html> diakses tanggal 10 Maret 2017

Astanti, Vera. 2016. *Selama 2016 Tiga Objek Wisata Milik Bojonegoro Sumbang PAD Lebih dari 1 Miliar*. dikutip dari <https://beritabojonegoro.com/read/9039-selama-2016-tiga-objek-wisata-milik-bojonegoro-sumbang-pad-lebih-1-miliar.html> diakses tanggal 10 Maret 2017

- Bagian Perekonomian Peta Potensi Investasi Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Seni dan Budaya Lokal*, diakses dari <http://www.investasi-bojonegoro.unigoro.ac.id/index.php/en/produk-unggulan/seni-dan-budaya-lokal> tanggal 18 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2016. *Agroguna Bojonegoro*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/agroguna-bojonegoro/> tanggal 20 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2016. *Alun-alun dan Batu Semar*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/alun-alun-dan-watu-semar/> tanggal 20 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2016. *Rendeng Pusat Kerajinan Gerabsah Malo*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/rendeng-pusat-kerajinan-gerabah-malo/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Kayangan Api*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/kayangan-api/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Dander Waterpark*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/dander-water-park/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Geoheritage Bojonegoro*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/geoheritage-bojonegoro/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Kedung Maor*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/kedung-maor/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Negeri Atas Angin*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/negeri-atas-angin-2/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Teksas Wonocolo*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/teksas-wonocolo/> tanggal 19 Januari 2018
- Bojonegoro Tourism Information Center. 2017. *Waduk Pacal*. diakses dari <https://wisatabojonegoro.com/waduk-pacal/> tanggal 19 Januari 2018
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro (2014), *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro*. diakses dari <http://dinbudpar.bojonegorokab.go.id/index.php/menu/detail/11/Tupoksi> tanggal 18 Januari 2018

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Watu Gandul*. diakses dari <http://dinbudpar.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/5> tanggal 19 Januari 2018
- GoFun Bojonegoro. 2017. *Menjelang Akhir Tahun GoFun Bojonegoro Bersiap Untuk Buka Pagi Hingga Malam*. diakses dari <https://www.gofun.co.id/id/news-events/39-menjelang-libur-akhir-tahun-gofun-bojonegoro-bersiap-untuk-buka-pagi> tanggal 20 Januari 2018 tanggal 20 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/geografi> tanggal 16 Januari 2017
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro : Demografi Kabupaten Bojonegoro*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/demografi> tanggal 19 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Tempat Sejarah dan Budaya*, diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/TempatSejarahdanBudaya> tanggal 19 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*. diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/geografi> tanggal 16 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Sejarah Kabupaten Bojonegoro*. diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/sejarah> tanggal 16 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Sosial dan Ekonomi : Urusan Sosial*. diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/sosialdanekonomi> tanggal 19 Januari 2018
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. t.t. *Visi dan Misi*. diakses dari <http://www.bojonegorokab.go.id/visimisi> tanggal 16 Januari 2018
- Sidarta, Mawan. 2015. *Inilah Jejak Prabu Angling Darma di Bojonegoro*. diakses dari https://www.kompasiana.com/mawan.sidarta/inilah-jejak-prabu-anglingdarma-di-bojonegoro_54f36b66745513962b6c74f3 tanggal 20 Januari 2018
- Suyoto. 2017. *Instagram @kangyotobgoro*. diakses dari <https://www.instagram.com/p/BYVfbNZhbQj/?hl=id&taken-by=kangyotobgoro> tanggal 21 Januari 2018

Tempo.co. 2017. *Sektor Pariwisata Sumbang PAD Bojonegoro Hingga 305 Persen*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/834898/sektor-pariwisata-sumbang-pad-bojonegoro-hingga-305-persen> tanggal 19 Januari 2018

LAIN-LAIN

Firmansyah, Reza Budi. 2007. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Kawasan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan Kabupaten Bojonegoro*. Malang : Skripsi Universitas Brawijaya

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mukti, Dyah Enggarini. 2018. Wawancara pada tanggal 16 Januari 2018

Mukti, Dyah Enggarini. 2018. Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Bojonegoro Sahabat Dunia Travel Guide : Daya Tarik Wisata Kabupaten Bojonegoro*. Pamflet Pariwisata Kabupaten Bojonegoro diambil tanggal 16 Januari 2017

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Bojonegoro Sahabat Dunia Travel Guide : Daya Tarik Wisata Kabupaten Bojonegoro*. Booklet Pariwisata Kabupaten Bojonegoro diambil tanggal 16 Januari 2017

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2016. *Data Kunjungan Wisata Tahun 2015* diambil tanggal 16 Januari 2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Data Kunjungan Wisata Tahun 2016* diambil tanggal 16 Januari 2018

Kushariyanto, Sigit. 2018. Wawancara pada tanggal 16 Januari 2016

Supriyo. 2018. Wawancara pada tanggal 15 Januari 2018

Rudianto. 2018. Wawancara pada tanggal 17 Januari 2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015*, data diambil pada tanggal 16 Januari 2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. 2018. *Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017*, data diambil pada tanggal 16 Januari 2018

Sarji. 2018. Wawancara pada tanggal 17 Januari 2018

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Sigit Kushariyanto, S.E., MM



Foto 2 : Bersama Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro



Foto 3 : Wawancara dengan Ibu Dyah Enggarini Mukti., S.E., MM



Foto 4 : Foto Bersama Ibu Dyah Enggarini Mukti, S.E., MM



Foto 5 : Foto Bersama Pengelola Dander Waterpark, Bapak Rudianto, Ibu Eka dan Ibu Rahma



Foto 6 : Foto Bersama Bapak Sarji, Pengelola Kayangan Api



Foto 7 : Wawancara dengan Bapak Supriyo Pengelola Agrowisata Belimbing Ngringinrejo



Foto 8 : Dander Waterpark



Foto 9 : Pintu Masuk Kawasan Kayangan Api



Foto 9 : Kegiatan di Kantor Bojonegoro Tourism Information Center



Foto 10 : Brosur dan Booklet Pariwisata Bojonegoro di Kantor Bojonegoro
Tourism Information Center

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI

BAPAK SIGIT KUSHARIYANTO, S.E., MM

Tanggal : 16 Januari 2018

Lokasi : Ruang Rapat Komisi B, Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro,
Jalan Trunojoyo Nomor 12 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P : Bagaimana peranan aktor kebijakan, khususnya DPRD Kabupaten Kabupaten Bojonegoro dalam formulasi kebijakan pariwisata ?

I : DPRD Kabupaten Bojonegoro, khususnya Komisi B sangat mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah Kabupaten Bojonegoro. Pertimbangannya karena seperti yang kita ketahui, industri pariwisata merupakan industri yang sangat menjanjikan. Artinya menjanjikan ini, adalah bisa ada keberlanjutan yang tidak mungkin habis. Yang kedua, ada potensi tempat-tempat yang sekiranya bisa dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Kebijakannya, terkait dengan kebijakan anggaran kita sangat mendorong. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pelaku dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan komponen-komponen yang lain. Komponen yang lain ini seperti partisipasi masyarakat, komunitas-komunitas yang peduli terhadap kepariwisataan. Kemudian peran pemerintah, mulai pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa, jadi pemerintah secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro harus mampu menciptakan industri pariwisata. Kalau desa di desanya. Kalau *scoop* kabupaten harus mencakup seluruh kabupaten. Untuk anggaran, kita sangat mendukung terutama untuk membangun infrastruktur kemudian fasilitas-fasilitas lain yang sekiranya mampu untuk mengekspose, atau *memblow-up* melalui iklan, melalui media, dan sebagainya supaya seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro ini dapat diketahui oleh masyarakat.

Kemudian yang lebih penting lagi, kita sangat mendorong adanya regulasi karena payung hukum ini sangat diperlukan. Karena pertama, memastikan lokasi karena akan ada keterkaitannya dengan perizinan dan lain sebagainya. Kedua, memastikan bisa dikembangkan. Nah regulasinya adalah pertama, yang harus disiapkan oleh Pemkab, dalam hal ini eksekutif adalah Perda tentang RIPDA atau Rencana Induk Pariwisata Daerah. Dengan adanya regulasi atau perda ini nantinya kita juga harus menyampaikan kepada kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan mungkin juga kementerian yang lain. Dengan harapannya, kementerian ini mau membantu dengan anggaran APBN. Bentuk anggarannya adalah DAK atau Dana Alokasi Khusus. Jadi memang disarankan oleh kementerian pariwisata bagi daerah untuk membentuk RIPDA. Jika sudah ada RIPDA, Kementerian pariwisata akan membantu anggaran minimal 5 Milyar. Jadi disayangkan jika kita tidak mengambil itu.

Kemudian, peranan dari DPRD dalam hal ini jika melihat formulasi kebijakan, kebijakan di kita adalah kebijakan politik, kebijakan anggaran, dan kebijakan pembangunan. Dengan adanya *feedback* dan kesinambungan dari tiga komponen ini tentunya dalam mendorong kebijakan pariwisata di Bojonegoro ini tentunya tiga hal ini harus kita pedomani. Secara politik menguntungkan atau tidak. Otomatis jika saya berbicara tentang politik harus menguntungkan organisasi saya. Terus kebijakan anggaran ya otomatis, kita memiliki kewenangan memiliki hak untuk *targeting*, ya otomatis kita dorong untuk itu, yang terakhir, tentang kebijakan pembangunan apakah target dalam industri pariwisata ini. Target pendapatan dan target ekonominya bagi masyarakat. Jika kita sudah membangun infrastruktur dan fasilitas yang kita bangun untuk masyarakat, kemudian ada retribusi yang muncul, kan membantu pendapatan daerah. Untuk ekonomi masyarakat, karena adanya kegiatan berkumpulnya masyarakat di objek wisata otomatis ada kegiatan ekonomi yang berjalan disitu. berarti dengan adanya satu destinasi wisata, berdampak pada beberapa hal atau beberapa sektor seperti sosial ekonomi, sumber daya manusia, ada lapangan pekerjaan yang muncul. Hal ini memang kewajiban pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut.

P : Berbicara mengenai kebijakan yang menguntungkan secara politik atau tidak seperti yang bapak sampaikan tadi. Apa ada kepentingan yang menguntungkan organisasi seperti yang bapak katakan tadi ?

I : Jadi begini, kita memiliki yang namanya pokok-pokok pikiran yang dalam hal ini bisa kita tampung. Karena pokok pikiran yang menjadi pokok pikiran anggota DPRD adalah aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat mengusulkan melalui kita, ada usulan *bottom-up* atau dari bawah. Nah tentunya kita memiliki hak untuk mengambil kebijakan yang sudah kita anggarakan. Nah ketika sudah kita anggarakan, kepada masyarakat tadi yang meminta program itu kita bisa sampaikan bahwa ini adalah program saya. Ini dulu kebijakan anggarannya dulu saya yang mengalokasikan dalam bentuk sebuah kebijakan yang aktif yang segera dilaksanakan. Jadi dari aspirasi masyarakat tersebut kita realisasikan. Misalnya, usulan mengenai akses jalan menuju lokasi wisata yang kita bangun atas usulan kita, dari aspirasi masyarakat yang telah ditampung melalui kita. Secara otomatis kita bisa mengklaim yang membangun jalan, menetapkan, merencanakan pembangunan jalan adalah saya. Nah itu secara politik akan menguntungkan saya karena masyarakat dapat melihat saya dari baju apa.

Untuk kepentingan secara umum baik bupati maupun DPRD ingin mensejahterakan masyarakatnya dengan cara kita memberikan fasilitas kepada masyarakat dan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian, ada dampak sosial dan ekonomi.

P : Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro: ?

I : yang terlibat adalah DPRD, Komunitas pelaku pariwisata di Bojonegoro, kemudian pihak-pihak perhotelan yang bekerjasama dengan kita melalui Asosiasi PHRI, Kemudian eksekutif yang bertindak sebagai inisiator, mereka memiliki peran eksekutorial jadi mereka yang mengeksekusi kebijakan baik kebijakan yang timbul di DPRD yang melakukan adalah mereka. Mereka yang melaksanakan pembangunannya, melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati, dan lain-lainnya. Tugas DPRD yang selanjutnya adalah untuk mengawasi sebagai fungsi *controlling*.

P : Apa peranan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?

I : Peranan pihak-pihak yang terlibat yang telah disebutkan tadi harus pro aktif, harus ada sinergitas dan kesinambungan kebijakan.

P : Apa saja kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat ?

I : kalau kita, DPRD dan Bupati adalah penyelenggara pemerintahan. Tugas kita secara umum adalah mensejahterakan masyarakat. Nah pihak-pihak lain selain dari eksekutif dan legislatif, yaitu masyarakat misalnya pengusaha, penyedia jasa, asosiasi-asosiasi yang memiliki kepedulian terhadap pariwisata mereka memiliki harapan dengan keterlibatannya dalam kegiatan industri pariwisata di Kabupaten Bojonegoro secara otomatis harapannya adalah mensejahterakan dirinya sendiri, ada penghasilan yang berdampak untuk mereka. Nah ini kepentingan dari masing-masing pihak.

P : Apa kebijakan pariwisata yang telah diambil telah menimbulkan dampak positif ?

I : Otomatis itu. Makanya harus jelas. Harus ada potensi, sumber daya, ada komunitas, ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat nah ini semuanya harus berkesinambungan dan bersinergi. Supaya nanti jika kita merumuskan kebijakan kepariwisataan tidak ada pihak yang keberatan.

P : Apa kebijakan yang dirumuskan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat ?

I : ya otomatis, untuk masyarakat bahwa kegiatan pariwisata akan berdampak secara sosial ekonomi. *Multiplier-effect*nya akan ada di sektor ekonomi.

Kemudian yang tidak kalah penting, promosi yang dilakukan misalnya dengan *tagline* “Ayo Wisata ke Bojonegoro “ nah dengan *tagline* ini, bagaimana caranya kita untuk mengajak orang untuk berpariwisata ke Bojonegoro. Nah dengan kita mengajak orang untuk berpariwisata ke

Bojonegoro ini maka kita harus menentukan kemana atau apa yang akan kita sajikan untuk mereka. Nah makanya sudah harus pasti dan jelas bahwa dari masing-masing tempat wisata ini harus menyajikan sesuatu yang menarik atau daya tarik tempat wisata tersebut bagi wisatawan. Nah hal ini kita dapat mengadopsi atau meniru dari daerah lain. Tapi yang paling penting yang ada di kita ini tidak ada di daerah lain, jadi memiliki ciri khas tersendiri. Nah kita harus menonjolkan *local wisdom* yang kita miliki.

Dengan adanya “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ini kita harus mengimplementasikan dari apa yang telah digembar-gemborkan. Jangan sampai apa yang digembar-gemborkan melalui media itu tidak sesuai atau jauh dari kenyataan. Sekarang kita ini harus melihat karakter dari masyarakat yang menyukai suatu keunikan. Tidak apa kita sedikit berbohong kepada masyarakat mengenai keunikan yang digembar-gemborkan.

Jadi kebijakan secara umum adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro ini harus ada sinergitas dari semua elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan elemen yang lain seperti sarana dan prasarana, daya dukung, infrastruktur, cara kita mengembangkan, bagaimana meyakinkan bahwa orang sangat tertarik dengan yang kita tawarkan. Harus ada inovasi baru setiap tahunnya dalam sektor pariwisata. Jadi inovasi dan gagasannya jangan pernah berhenti.

P : Jika dibandingkan dengan dahulu, maka sektor pariwisata sudah jauh lebih berkembang ?

I : Iya, jika dibandingkan dengan dahulu ya sangat berkembang karena perkembangan ini adalah dampak dari adanya industri migas di Kabupaten Bojonegoro dan kekuatan APBD kita, jadi sangat berdampak.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI

IBU DYAH ENGGARINI MUKTI., S.E., MM

Tanggal : 16 Januari 2018

Lokasi : Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro,
Jalan Teuku Umar No. 80, Kel. Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P : Siapa saja aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?

I : Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini sebenarnya ada banyak karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pariwisata yang jelas itu melibatkan banyak pihak yang kami sebut akademisi, *business*, *government*, *community*, dan media. Jadi kami menyebutnya sebagai ABGCM. Jadi ABGCM ini disebut *pentahelic*. Jadi sebenarnya lima aktor ini yang berperan. Jadi dari kelimanya jika ada satu saja yang tidak bergerak maka pariwisata tidak bisa berjalan. Jadi kita memiliki panduan yang memuat bagaimana atau rencana strategis apa yang akan kita kembangkan, kita ada panduan. Nah panduan itu kemudian kita tuangkan ke dalam RIPARDA. Jadi tahun ini kita sudah punya RIPARDA, kita susun panduan dari sisi kebijakan dan sisi strategis untuk pembangunan pariwisata. Kami sebenarnya mulai mengembangkan pariwisata di tahun 2015. Jadi kalau dulu Bojonegoro belum terlalu fokus di sisi pariwisata, jadi mulai tahun 2015 sampai sekarang baru mau mulai kita kembangkan. Jadi dalam formulasi kebijakan kita yang memberikan pengarah kebijakan dan menentukan kawasan strategis berdasarkan pada potensi dan komitmen dari masyarakat. Karena yang kita kembangkan ini ada tiga destinasi yaitu destinasi yang berbasis masyarakat dan destinasi yang berbasis industri yang dikerjakan oleh investor, dan destinasi yang dikerjakan oleh Pemerintah

Daerah. Nah dari ketiga destinasi ini kami menentukan arah kebijakan dari masing-masing. Arah kebijakan itu berkaitan dengan kondisi eksisting. Kondisi eksisting itu dalam arti kondisi fisik dan non-fisik. Kondisi fisik berarti bagaimana sarana dan prasarannya, apa sudah siap. Kalau belum siap, berarti kita buat semacam matriks bagaimana kesiapan dari masing-masing objek itu baik itu dari kondisi fisik maupun non-fisik. Kalau dari kondisi non-fisik itu nanti dilihat bagaimana kelembagaannya, bagaimana SDMnya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana kesiapan masyarakat untuk menyambut, dan sebagainya. Itu semua kita tuangkan disini.

P : Bagaimana peranan aktor dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?

I : Berbicara mengenai peranan pemerintah, kita menjadi fasilitator karena kita memfasilitasi mereka baik itu fasilitas fisik maupun non-fisik , bisa jadi regulator karena kita yang menetapkan regulasi. Dan kita juga bisa jadi membantu mereka, dalam hal ini membantu untuk memberikan bantuan dalam pendampingan dan pengembangan. Hal ini disebabkan karena pemerintah kan bisa melakukan apapun. Karena kita memiliki berbagai macam sumber yaitu kita punya duit, kita punya daya, dan kita punya dukungan. Kan pemerintah memiliki tiga hal ini jadi bisa melakukan apa saja. Dan sektor pariwisata membutuhkan 3D tersebut

P : Apa saja kepentingan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pariwisata Kabupaten Bojonegoro melalui program “Ayo Wisata ke Bojonegoro” ?

I : Untuk kepentingannya, kita menciptakan strategi dan tujuan yang tercantum di dalam RPJMD. Tujuan yang tercantum di dalam RPJMD ini ada dua, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kunjungan wisata di Bojonegoro dan bagaimana meningkatkan lama tinggal di Bojonegoro. Jadi ketika tingkat kunjungan itu naik secara otomatis roda perputaran ekonomi di Bojonegoro akan naik. Ketika lama tinggal itu naik, maka okupansi hotel akan naik, berarti juga akan menimbulkan dampak signifikan bagi industri. Industrinya banyak seperti kuliner, penyediaan souvenir, dan lain-lain.

P : Jadi pada saat pembuatan kebijakan pariwisata tersebut, dari Disbudpar apa juga ke DPRD untuk merembuhkan kepentingan dari Disbudpar atas kebijakan Pariwisata akan diformulasikan menjadi seperti apa ?

I : jadi sebenarnya kita membuat kebijakan itu atas dasar survey. Jadi maksudnya kami mengumpulkan terlebih dahulu keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi itu seperti apa. Jadi kita analisa dulu, dari kebutuhan, potensi, dan komitmen dari masyarakat kita analisa. Jadi dari situ akan timbul, dengan potensi seperti ini, terus komitmen dari masyarakat itu seperti ini, dan kebutuhannya itu seperti ini, nah itu yang kita susun dan kita skoring yang kemudian kita susun lagi ke dalam suatu kebijakan. Tapi, karena kami menginginkan bahwa bertumbuhnya destinasi pariwisata itu dari bawah, maka kami mengharapkan bahwa pariwisata itu tidak kami yang memompa semangat mereka di masing-masing daerahnya, tapi tumbuh dari mereka. Nah ketika ada semangat yang utmbuh dari mereka kita berharap bahwa pemerintah desa akan memfasilitasi melalui APBDes, ini untuk pariwisata yang berbasis desa. Untuk wisata yang berbasis industri, kami bergerak melalui semacam asosiasi pelaku pariwisata yaitu ASFI yang anggotanya terdiri dari berbagai macam unsur pengusaha nah kita bergerak melalui itu. Jadi investasi untuk apapun di Bojonegoro itu dimudahkan, perizinannya juga dimudahkan. Nah kita bergerak melalui itu. Terus, wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah kan ada 3, yaitu Waduk Pacal, Kayangan Api, dan Dander Waterpark. Nah setiap tahun akan ada pembiayaan melalui APBD. Jadi berbeda untuk selain 3 wisata ini, seperti wisata desa, kebijakannya kita rembugkan bersama-sama, tetapi kita harapkan dari APBDes untuk kebijakan pembangunan berbasis masyarakat. Lalu yang untuk wisata industri itu tadi, kita berikan insentif berupa kemudahan perizinan, fasilitas promosi mereka kita bantu promosinya, belum lagi misal kalau ada *event* mereka akan kita libatkan.

P : Apakah kebijakan pariwisata yang diformulasikan telah menimbulkan dampak positif bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro ?

I : ukuran dampak positif itu kalau menurut saya adalah kenaikan tingkat kunjungan, dan kenaikan okupansi karena itu adalah strategi kita. Berdasarkan data saja, kalau dari data nanti bisa dianalisis terpautnya tingkat

kunjungan. Nah dampak positif dari pariwisata kan banyak, *seperti multiplier effect* pengembangan pariwisata.

Pariwisata kan luas, tidak hanya menyangkut tempat saja. Jadi pariwisata itu mengandung budaya, destinasi, atraksi wisata dan juga industri wisata. Jadi keempatnya ini tidak dapat dipisahkan. Jadi nanti disitu mulai dari penyediaan akomodasi, jasa penyediaan transportasi. Tidak hanya aksesnya saja, tapi juga dari sisi amenitas, dari sisi kesediaan moda transportasi, dan bagaimana kesediaan SDM. Jadi memahami pariwisata itu tidak hanya dari lingkup destinasi, tapi juga banyak hal. Jadi ketika kita akan mengembangkan satu destinasi saja kita juga harus memikirkan ketiga hal tersebut.

Kalau untuk objek wisata itu bisa diciptakan. Tapi dari SDM itu yang harus disiapkan secara pelan-pelan karena merubah *mindset* itu tidak mudah. Jadi ketika ada potensi wilayah yang bagus namun SDM tidak *aware* tentang potensi di sekitarnya, itu tidak akan jalan. Jadi SDM harus disiapkan secara matang, karena kunjungan wisata pasti mengalami fluktuasi. Jadi ketika ada penurunan jumlah kunjungan masyarakat juga sudah harus berfikir inovasi apa yang harus dilakukan supaya tingkat kunjungan naik kembali. Kalau kami sebagai pemerintah yang mengelola ketiga destinasi pariwisata tersebut pasti kami tidak kehilangan inovasi karena kami memiliki 3D tadi. Tapi kalau masyarakat tadi, memang sudah tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat. Bagaimana kami memompa semangat mereka, dan merubah *mindset* mereka. Apalagi, kesulitan Bojonegoro dalam mengembangkan pariwisata itu banyak karena kita tidak memiliki laut dan gunung. Secara strategis, Bojonegoro juga bukan merupakan wilayah yang menjadi akses utama karena kita berada di tengah-tengah tidak seperti Tuban dan Lamongan yang merupakan akses utama dan memiliki laut atau Nganjuk yang memiliki gunung.

Kita ingin menciptakan satu destinasi unggulan yang mampu menjadi pancingan untuk tumbuhnya destinasi lain. Yang sudah direncanakan adalah pembangunan *geopark* dan agrowisata.

Setiap tahun kita juga mengadakan apresiasi desa wisata terbaik. Jadi mereka yang menang mendapatkan hadiah berupa toilet atau fasilitas umum lainnya yang memacu semangat mereka untuk berkompetisi.

P : Lalu, dari DPRD, Eksekutif, dan Disbudpar sendiri bagaimana ? Apa sudah selaras keinginannya ?

I : Kalau yang sekarang sudah bagus, sudah selaras. Kalau yang saya lihat di Komisi B yang membidangi pariwisata, juga Komisi A yang sering menyuarakan mengenai pariwisata, kami melihat DPRD yang sekarang juga melihat dampak dari pengembangan pariwisata itu bagus. Jadi *event* kami, pengembangan destinasi itu mendapatkan banyak dukungan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mulai dari tahun 2015 ini pariwisata mendapatkan perhatian. Data yang anda dapatkan juga mungkin banyak berasal mulai dari tahun 2015 karena mulai dari tahun itu mulai ada perbaikan pariwisata. Sekarang kita juga punya aplikasi BOTIC atau Bojonegoro Tourism Information Center.

Rencana selanjutnya kami akan mengusulkan Perbup tentang standarisasi dan regulasi desa wisata, tapi ini belum jadi. Jadi untuk membuat desa wisata itu harus mempersiapkan apa saja. Yang pertama adalah adanya tingkat kunjungan, jadi jika sudah ada tingkat kunjungan baru ditetapkan sebagai desa wisata. Yang kedua baru ada atraksi, daya tarik, dan lain-lain.

**Data Kunjungan Wisata
Tahun 2015**

Waduk Pacal	Kayangan Api	Dander Water Park
14.099	37.730	4.802
TOTAL		56.631

**Data Kunjungan Wisata
Tahun 2016**

Bulan	Waduk Pacal	Kayangan Api	Dander Water Park
Januari	3.401	10.843	21.700
Pebruari	1.130	4.727	8.568
Maret	775	2.614	8.403
April	786	3.200	7.983
Mei	1.070	3.987	9.095
Juni	446	1.331	1.529
Juli	4.409	10.609	10.957
Agustus	1.056	2.338	2.510
September	853	2.074	2.388
Oktober	1.165	3.208	4.140
November	1.565	3.596	3.532
Desember	2.979	8.388	9.774
	19.635	56.915	90.579
TOTAL			167.129

DATA KUNJUNGAN WISATA

TAHUN 2016

NO	OBYEK WISATA	JUMLAH PENGUNJUNG	DASAR PERHITUNGAN
1	DANDER WATERPARK	90.579	tiket masuk
2	KAYANGAN API	56.915	tiket masuk
3	WADUK PACAL	19.635	tiket masuk
4	GROWGOLAND NGUNUT	2.200	tiket parkir
5	KEDUNGMAOR	1.286	tiket parkir
6	WATU GANDUL	470	tiket masuk mulai Juli
7	NEGERI ATAS ANGIN	82.443	tiket masuk mulai April
8	AGROWISATA BELIMBING	129.600	tiket masuk
9	WISATA EDUKASI GERABAH	13.342	paket edukasi
10	WALI KIDANGAN	1.946	buku tamu
11	WONOCOLO	3.255	buku tamu dan observasi
12	AGROGUNA	36.500	pengunjung kebun
13	GO FUN	217.000	tiket masuk
14	AGROWISATA SALAK	1.300	buku tamu
15	WISATA EDUKASI MOJODESO	300	buku tamu
		659.619	

Tingkat Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2017

NO	NAMA DAYA TARIK	KUNJUNGAN DAYA TARIK WISATA												2017	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	DANDER WATER PARK	11.766	2.455	4.079	5.954	4.766	5.845	5.776	676	2.082	3.724	1.742	9.072	57.947	
2	KAYANGAN API	10.968	3.020	2.765	4.192	3.799	12.100	8.080	2.870	2.910	4.016	2.443	8.356	65.519	
3	WADUK PACAL	4.745	1.615	1.462	1.932	2.228	4.349	3.822	1.616	1.476	1.718	1.484	3.423	29.870	
4	GOFUN	21.668	8.569	14.025	13.469	10.886	21.691	29.778	10.894	19.347	18.074	14.568	30.734	213.703	
5	NEGERI ATAS ANGIN	11.532	2.924	3.060	3.173	3.332	10.035	1.950	800	1.800	2.700	1.980	9.325	52.611	
6	AGRO WISATA BLIMBING	25.292	8.000	9.640	10.150	9.150	13.300	13.300	5.100	8.900	9.250	7.025	26.605	145.712	
7	EDUKASI GERABAH	897	1.146	2.060	1.624	1.018	3.755	1.200	1.300	1.100	1.400	1.517	2.342	19.359	
8	RUMAH SINGGAH DAN TEKSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270	
9	AGRO GUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.100	
10	AGRO WISATA SALAK WEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923	
11	AGRO WISATA SALAK TANJUNGHARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012	
12	AGRO WISATA SUSUR SUNGAI MOJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.552	
13	WISATA EDUKASI MOJODESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387	
14	KEDUNGMAOR	756	715	836	947	-	-	-	-	-	-	-	-	3.254	
15	MASYARAKAT SAMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.260	
16	PENANGKARAN RUSA MALO	11	161	144	433	155	199	220	25	400	205	188	234	2.375	
17	GROWGLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	2.850	3.407	
18	BURIT TONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.076	
19	WISATA KRONDONAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.309	
20	AGRO WISATA JAMBU PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687	
21	SEMAYOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
22	WALI KIDANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.557	
23	WATU GANDUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH													674.948	

A. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 disajikan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

Mendukung tercapainya :

MISI KE 1 (SATU) “MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, SEIMBANG DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN INDUSTRI PANGAN DAN ENERGI”

Misi 1 Tujuan 1:

Meningkatnya perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas,

Sasaran (3) Meningkatnya sektor pariwisata diukur melalui indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata, Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata, Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata dan Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata yang memenuhi standar sebagaimana tabel berikut

TABEL 3.4

Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 3

Sasaran	Indikator/ Satuan	Formula	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Tercapai/ kurang tercapai	Naik/ turun	Target Nasional
Meningkat nya sektor pariwisata	Persentase peningkat an kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata Th n – Th(n- 1)/ Jumlah kunjungan wisata Th n – 1 x 100%	53.631 pengun jung	10 (64.782 pengun jung)	10 (659.619 pengun jung)	tercapai	naik	-

	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Th n – Th(n-1)/ Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Th n – 1 x 100%	4 Obyek	10 (4 Obyek)	10 (4 obyek)	tercapai	naik	-
	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	Jumlah peningkatan PAD Th n – Th(n-1)/ Jumlah peningkatan PAD Th n – 1 x 100%	Rp. 405.343 .000,-	10 Rp. 378.000. 000,-)	10 (Rp. 1.532.85 7.500,-)	tercapai	naik	-
	Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata	Jumlah daerah tujuan obyek wisata Th n – Th(n-1)/ Jumlah daerah tujuan obyek wisata Th n – 1 x 100%	42 Obyek	1 (7 obyek)	1 (43 obyek)	tercapai	naik	-
	Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata yang memenuhi standar	Jumlah obyek wisata yang memenuhi standar Th n – Th(n-1)/ Jumlah obyek wisata yang memenuhi standar Th n – 1 x 100%	2 Obyek	10 (2 obyek)	10 (2 obyek)	tercapai	naik	-

. Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Tabel 3.4

- Sasaran Meningkatnya sektor pariwisata diukur melalui indikator :
1. Persentase peningkatan kunjungan wisata, yang ditetapkan 64.782 pengunjung tercapai 659.619 pengunjung.
 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, yang ditetapkan 4 obyek tercapai 4 obyek.
 3. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata, yang ditetapkan Rp. 378.000.000,- tercapai Rp. 1.532.857.500,-

4. Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata, yang ditetapkan 7 obyek wisata tercapai 43 obyek wisata.
5. Persentase peningkatan daerah tujuan obyek wisata yang memenuhi standar yang ditetapkan 2 obyek wisata tercapai 2 obyek wisata.

jadi dapat disimpulkan capaian dari sasaran tersebut **tercapai** dan dibandingkan capaian tahun 2015 **naik**

Strategi yang dilaksanakan untuk capaian kinerja tersebut dilakukan dengan Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Pemasaran pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.